



LAPORAN

HASIL EVALUASI

PELAKSANAAN RKPD DAN RENJA PROVINSI NTB TRIWULAN II 2023



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2023


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridha-Nya sehingga Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB pada Triwulan II tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Laporan Evaluasi RKPD Triwulan II merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan II Tahun 2023. Laporan ini mengacu pada RKPD Tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB. Sampai Triwulan II Tahun 2023, terdapat 9 indikator atau 24,32 persen telah dapat diukur pencapaiannya dimana sebanyak 4 indikator atau 10,81 persen telah sesuai bahkan melampaui target tahun 2023, sedangkan 5 indikator atau 13,51 persen belum mencapai target. Sisanya sebanyak 28 indikator atau 75,68 persen belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait.

Selain IKU, Indikator Kinerja Daerah (IKD) juga digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB dari kondisi awal sampai akhir periode RPJMD. Terdapat 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2023, dimana sebanyak 23 Indikator sudah dapat diukur pencapaiannya dengan 12 indikator atau 11,65 persen sudah sesuai target bahkan melampaui, 11 indikator atau 10,68 persen belum memenuhi target. Sisanya sebanyak 80 indikator atau 77,67 persen belum tersedia (Not Available/NA) karena belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja serta sebagai bahan perencanaan selanjutnya dalam pembangunan di NTB. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan Bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Mataram, Juli 2023
Kepala BAPPEDA Provinsi NTB

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631231 199403 1 153

RINGKASAN

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dimana pemerintah provinsi NTB dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik tahunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renja perangkat daerah Provinsi NTB Tahun 2023 maupun lima tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023 harus mengetahui progres dan tingkat capaian secara berkala dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan.

Laporan evaluasi RKPD Triwulan II merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan II Tahun 2023. Evaluasi ini mengacu pada RKPD Tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 Indikator Kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.991.980.923.513.

Hasil capaian kinerja sampai Triwulan II tahun 2023 dapat dideskripsikan bahwa dari 120 program prioritas pembangunan daerah, rata-rata capaian kinerja sebesar 39,25 persen dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.980.881.515.948 atau 33,06 persen. Rendahnya capaian kinerja disebabkan karena pekerjaan pada Triwulan II masih terfokus pada program kegiatan yang bersifat administratif, dan pembayaran hutang pada Tahun Anggaran 2022, serta adanya kebijakan penghentian sementara pelaksanaan kegiatan perangkat daerah tahun anggaran 2023 yang pendanaannya bersumber dari dana bebas seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bebas dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan III- IV tahun anggaran 2023.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37

indikator kinerja utama yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Sampai Triwulan II Tahun 2023, terdapat 9 indikator atau 24,32 persen telah dapat diukur pencapaiannya dimana sebanyak 4 indikator atau 10,81 persen telah sesuai bahkan melampaui target tahun 2023, sedangkan 5 indikator atau 13,51 persen belum mencapai target. Sisanya sebanyak 28 indikator atau 75,68 persen belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Indikator yang sudah sesuai bahkan melampaui target yaitu Indeks Kapasitas Daerah; Opini BPK; Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD; dan Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) juga sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB dari kondisi awal sampai akhir periode RPJMD. Terdapat 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2023, dimana sebanyak 23 Indikator sudah dapat diukur pencapaiannya dengan 12 indikator atau 11,65 persen sudah sesuai target bahkan melampaui, 11 indikator atau 10,68 persen belum memenuhi target. Sisanya sebanyak 80 indikator atau 77,67 persen belum tersedia (Not Available/NA) karena belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Sasaran.....	3
1.5 Sistematika Penulisan Laporan.....	3
BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023	4
2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2023	4
2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023	5
2.3 Prioritas Pembangunan dan Target Pembangunan Tahun 2023.....	6
BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH DAERAH TAHUN 2023.....	10
BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2023 TRIWULAN II.....	34
4.1 Capaian RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sampai Tahun 2023	34
4.2.1 Indikator Kinerja Utama	34
4.2.2 Indikator Kinerja Daerah.....	40
BAB V : PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Rekomendasi	51

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari NKRI, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD tersebut. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Barat baik dalam skala nasional maupun regional.

RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023. Penyusunan RKPD Provinsi NTB Tahun 2023 merupakan tahun terakhir atau tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2023. Sebagai gambaran bahwa dalam tahapan pencapaian RPJMD Provinsi NTB pada tahun pertama fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa tahun 2018 dengan percepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat, tahap kedua penguatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang pada masa pandemi Covid-19, tahap ketiga dan keempat fokus pada pemulihan sosial ekonomi masyarakat dengan penguatan industrialisasi dan penanggulangan kemiskinan dampak pandemi Covid-19 dan tahun kelima atau tahun terakhir adalah merupakan pencapaian kegemilangan masyarakat NTB yang sejahtera dan mandiri dengan Indeks Pembangunan Manusia yang semakin tinggi dengan mengusung Tema: "Peningkatan Produktivitas Industri dan Diversifikasi Ekonomi yang Inklusif Untuk Mewujudkan Kegemilangan NTB yang Berkelanjutan".

Dalam mewujudkan dan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD maka dilaksanakan pengendalian dan evaluasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan setiap triwulan guna memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai. Hal ini dilaksanakan berdasarkan amanat yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada pasal 261 disebutkan bahwa evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Provinsi untuk mengetahui realisasi antara rencana program, kegiatan, dan sub

kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; serta realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi. Apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan baik dari aspek perencanaan dan pelaksanaannya maka BAPPEDA bersama dengan perangkat daerah terkait melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan baik pada pelaksanaan program/ kegiatan pada triwulan berikutnya maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan perubahan RKPD provinsi NTB Tahun 2023 dan RKPD Provinsi NTB tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 ini adalah untuk mengetahui:

1. Daya serap dan capaian target kinerja sasaran pembangunan dan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2023;

2. Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan;
3. Kinerja sebelumnya yang dapat dicapai dalam pelaksanaan pembangunan baik tingkat program maupun kegiatan.

1.4 Sasaran

Sasaran dari kegiatan evaluasi RKPD Tahun 2023 ini adalah untuk mengukur capaian Sasaran Pembangunan dan program/kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2023.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penulisan Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran, dan sistematika penulisan laporan;
- Bab II : Prioritas, Sasaran dan Target Pembangunan Tahun 2023. Bab ini berisi tentang prioritas sasaran dan target pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023;
- Bab III : Rencana Program Prioritas Tahun 2023. Bab ini berisi tentang rincian program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2023.
- Bab IV : Capaian Target Kinerja Pembangunan Triwulan II Tahun 2023. Bab ini berisi Capaian Target Kinerja Sasaran Pembangunan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas serta Penyerapan Anggaran Tahun 2023 sampai Triwulan II.
- Bab V : Penutup

BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2023

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2023 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023.

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan RPJMD tahun 2019-2023 adalah "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang". Dalam rangka mewujudkan visi, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 -2023 sebagai berikut:

Misi 1 "NTB TANGGUH DAN MANTAP" melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah;

Misi 2 "NTB BERSIH DAN MELAYANI" melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;

Misi 3 "NTB SEHAT DAN CERDAS" melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;

Misi 4 "NTB ASRI DAN LESTARI" melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;

Misi 5 "NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI" melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi;

Misi 6 "NTB ADIL DAN BERKAH" melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Adapun tujuan pembangunan NTB Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketangguhan menghadapi resiko bencana.
2. Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk pengembangan sektor unggulan.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel.
4. Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing.
5. Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing.
6. Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan.
7. Terwujudnya pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi yang berkualitas.
8. Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan.
9. Terwujudnya perindustrian yang unggul.
10. Terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani (Bahagia).

Berdasarkan tujuan pembangunan, maka sasaran pembangunan NTB Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana.
2. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
3. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah.
5. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Meningkatnya Profesionalisme ASN.
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
10. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan.
11. Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
12. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan.
13. Meningkatnya Investasi (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).
14. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas.
15. Meningkatnya Jaminan Kesehatan dan Sosial bagi Penduduk Miskin .
16. Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan.
17. Terpenuhinya Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin.
18. Terjaganya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok.
19. Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup.
20. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata.
21. Meningkatnya Daya Saing Industri.
22. Menurunnya Pengangguran Terbuka.
23. Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat.
24. Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah.
25. Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat.
26. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2023 merupakan irisan dari tahapan Lima Tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan periode ketiga dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Dokumen RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sendiri memiliki peran penting dalam mewujudkan Visi Pembangunan NTB yaitu "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang".

Dalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari periode RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penanganan Covid Dan Pemulihan Ekonomi Daerah
2. Peningkatan Kualitas SDM
3. Peningkatan PAD Dan Pelayanan Publik, dengan strategi:
4. Peningkatan Industrialisasi Sektor Unggulan
5. Pembangunan Infrastruktur Layanan dasar dan kualitas lingkungan
6. Perluasan Lapangan Kerja
7. Percepatan Penurunan Kemiskinan

2.3 Prioritas Pembangunan dan Target Pembangunan Tahun 2023

Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Produktivitas Industri dan Diversifikasi Ekonomi yang Inklusif Untuk Mewujudkan Kegemilangan NTB yang Berkelanjutan”**. Adapun Prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD 2023 yaitu :

1. Memperkuat Mitigasi dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana, mendukung Prioritas Nasional 6;
2. Membangun Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah untuk Mendukung Pelayanan Dasar dan Pengembangan Ekonomi, mendukung Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 5;
3. Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik mendukung Prioritas Nasional 7
4. Meningkatkan Kualitas Kesehatan SDM, mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Nasional 3;
5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan SDM, mendukung Prioritas Nasional 3;
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan, mendukung Prioritas Nasional 6;
7. Memperkuat Integrasi Hulu-Hilir Sistem Agribisnis Dalam Mendukung Investasi, mendukung Prioritas Nasional 1;
8. Mengoptimalkan Pengelolaan Pariwisata Pasca Pandemi Covid-19, mendukung Prioritas Nasional 1;
9. Industrialisasi Produk Unggulan, mendukung Prioritas Nasional 1;
10. Penguatan Stabilitas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, mendukung Prioritas Nasional 4.

Target Pembangunan berdasarkan sasaran pembangunan Tahun 2023 disajikan dalam matrik sebagai berikut:

Tabel 2.1. Target Pembangunan Berdasarkan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2023	
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (Point)			Point	115,83	
				Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,72	
		Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas				Point	81,17
				Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	%	86,60	
					Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	54,50	
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	89,14	
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Point	BB	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP	
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	38,65	
				Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	A (80,01 - 90,00)	
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,72	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4,55	
				3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan	
Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,48					
	Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	30,49					
Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan						Point	63,10
		Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah			Tahun	13,79	
			Rata-rata Lama Sekolah			Tahun	7,07	
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam	Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Point	68,25	
				Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung	Indeks Kualitas Air	Point	43,03	
					Indeks Kualitas Udara	Point	87,59	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2023
	dan lingkungan yang berkelanjutan	bersih dan berkelanjutan		Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Laut	Point	87,66
Indeks Kualitas Tutupan Lahan					Point	69,70	
Neraca pengelolaan sampah					%	100,00	
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan				Persentase Penanganan Sampah	%	70,00	
				Persentase Pengurangan Sampah	%	30,00	
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli			Point	75,56
				Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	68201,79
				Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,88
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100,00
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	87,20
				Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	80,59
					Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	82,46
					Rasio Elektrifikasi	%	99,99
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	68,95
				Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0
				Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11.944
						%	4,50

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2023
		Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	137,24
		Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri			%	9,00
				Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	179,91
				Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,17
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminalitas			Point	13,25
				Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	0,00
				Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	6,07
			Partisipasi politik masyarakat			%	85,20
				Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	1,00
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Point	61,40
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	20,47
					Cakupan Kabupaten/Kot a Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kot a Layak Anak	%	100,00

BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH DAERAH TAHUN 2023

Program pembangunan daerah didasarkan pada program yang mendukung sasaran pembangunan daerah yang disusun sesuai dengan nomenklatur program yang tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagaimana telah dituangkan dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2023. Adapun program pembangunan daerah pada Tahun 2023 sebanyak 120 program dari 147 Program perangkat daerah sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Penanganan Bencana
3. Program Penyelenggaraan Jalan
4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj)
6. Program Pengelolaan Pelayaran
7. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
9. Program Penyelenggaran Pengawasan
10. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
11. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
13. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
14. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
15. Program Penataan Organisasi
16. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
17. Program Kepegawaian Daerah
18. Pengembangan Sumber Daya Manusia
19. Program Pendaftaran Penduduk
20. Program Pencatatan Sipil
21. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
22. Program Peningkatan Kerjasama Desa
23. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
24. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
25. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
26. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
27. Program Perencanaan Tenaga Kerja
28. Program Pembinaan Perpustakaan

29. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
30. Program Pelayanan Penghubung
31. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
32. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
33. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
34. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
35. Program Pengelolaan Pendidikan
36. Program Pengembangan Kurikulum
37. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
38. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
39. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
40. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
41. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
42. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
43. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
44. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
45. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
46. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
47. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
48. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
49. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
50. Program Pengelolaan Hutan
51. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
52. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
53. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)
54. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
55. Program Pengelolaan Persampahan
56. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
57. Program Promosi Penanaman Modal
58. Program Pelayanan Penanaman Modal
59. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
60. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
61. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
62. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
63. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
64. Program Penyuluhan Pertanian

65. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
66. Program Pengelolaan Hutan
67. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
68. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
69. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
70. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
71. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
72. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
73. Program Rehabilitasi Sosial
74. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
75. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
76. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
77. Program Penanganan Kerawanan Pangan
78. Program Pengawasan Keamanan Pangan
79. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
80. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
81. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
82. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
83. Program Pengembangan Perumahan
84. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
85. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
86. Program Pengembangan Ekspor
87. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
88. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
89. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
90. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
91. Program Pemasaran Pariwisata
92. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
93. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
94. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
95. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
96. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
97. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
98. Program Pengembangan Umkm
99. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
100. Program Penempatan Tenaga Kerja
101. Program Hubungan Industrial
102. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

103. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
104. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
105. Program Kesejahteraan Rakyat
106. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
107. Program Pengembangan Kebudayaan
108. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
109. Program Pembinaan Sejarah
110. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
111. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
112. Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum
113. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
114. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
115. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
116. Program Perlindungan Perempuan
117. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
118. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
119. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
120. Program Perlindungan Khusus Anak

Pemetaan program Pembangunan Daerah kedalam sasaran pembangunan pada Tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Program Pembangunan Daerah Kedalam Sasaran Pembangunan Pada Tahun 2023

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah							
Tujuan 1: Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Point	115,83		115,83		
Sasaran: Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,65		0,65		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB	%	40,09	5.537	40,09	14.445	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
	Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	%	92,50		92,50		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%	100	2.572	100	7.543	Dinas Sosial
Tujuan 2: Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas	Point	81,17		81,17		
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase Kemantapan jalan	%	86,60		86,60		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	86,60	251.253	86,60	931.804	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	54,50		54,50		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi	%	76,28	91.491	76,28	342.401	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 2: Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	89,14		89,14		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	81,63	5.535	81,63	14.665	Dinas Perhubungan
	Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	100		100		
	Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%	40		40		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	52.58		52.58		
PROGRAM PENGELOLAAN Pelayaran	Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%	66.06	932	66,06	2.261	Dinas Perhubungan
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi							
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	BB		BB		
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP		WTP		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	%	100	824.559	100	2.275.817	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	%	100	1.202	100		
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	%	75	2.062	75	5.689	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	%	90	1.447	90	3.807	INSPEKTORAT
	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	%	48,89	2.841	48,89		
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	%	7,55	533	7,55	1.402	INSPEKTORAT
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%	97	2.106	97		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	38,65		38,65		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Derajat Desentralisasi Fiskal	%	38,44	585	38,44	1.668	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	%	54,03	16.212	54,03	46.184	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	A (80,01 - 90,00)		A (80,01 - 90,00)		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	%	100	5.431	100	14.444	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100	14.225	100	37.833	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase PD yang Meningkat Nilai Implementasi SAKIP- nya	%	100	1.108	100	2.917	INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	%	26,66	961	26,66	2.529	INSPEKTORAT
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkat	%		1.412		3.842	Biro Organisasi
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%	100	3.486	100	9.485	Biro Pemerintahan
Sasaran 4: Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,72		0,72		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Aspek Sistem Informasi	Nilai	19	7.865	19	21.515	Badan Kepegawaian Daerah
	Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan		80		80		
	Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi		115		135		
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan		134		136		
	Nilai Aspek Sistem Informasi		19		19		
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	0,10	18.248	0,10	51.655	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%	0,04		0,04	-	
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%	0,15		0,15	-	
	Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%	0,62		0,62		
Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4,55		4,55		
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk	%	98,90	346	98,90	880	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%	100	257	100	654	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	%	100	1.242	100	3.155	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkaran hutan dan pesisir	%	25	119	25	267	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	%	80	6.703	80	16.947	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Berbasis TIK (%)	%	65	2.464	65	6.229	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi	%	30	605	30	1.531	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)	%	50	590	50	1.492	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	90	115	90	300	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	100	1.294	100	3.406	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah	%	100	237	100	624	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Angka kunjungan wisatawan pada	Orang	43.000		43.000		Badan Penghubung Daerah

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	Anjungan NTB TMII (orang)						
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah							
Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan kehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan	Point	73,05		73,05		
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,48		67,48		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kehatan yang terakreditasi	%	85	176.236	85	490.193	Dinas Kesehatan
	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kehatan	%	97		97		
	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kehatan yzng sesuai standar	%	80		80		
	Persentase pelayanan kehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	%	100		100		
	Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80%	%	100		100		
	Persentase Kualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	100		100		
	Persentase fasilitas pelayanan kehatan yang menggunakan obat rasional	%	100		100		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	3	1.499	3	3.651	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat	%	95	108	95	240	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	90	56.163	90	163.140	Rumah Sakit Umum Daerah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	76,19	11.992	76,19	29.810	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
	Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80		80	-	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	80,00	59.051	80,00	144.479	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Persentase Balita Stunting	%	30,49		30,49		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita Wasting	%	10,41		10,41	-	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen)	%	100	1.987	80	5.060	Dinas Kesehatan
Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan	Point	63,10		63,10		
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,79		13,79		
	Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7,07		7,07		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	100	516.005	100	1.486.214	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	95,28		95,28		
	Persen Angka Partisipasi Sekolah	%	98,02		98,02		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	(APS) Pendidikan Menengah						
	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	70,6		70,6		
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1		1		
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	%	18		18		
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	%	1:10		1:10		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum	%	100	723	100	1.987	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100	71.966	100	208.215	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100		100		
	Persentase Kepala Sekolah bersertifikat	%	100		100		
	Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	%	70		100		
	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)		6,5		80		
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	%	100	68	6,5	195	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%	30	322	100	832	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	4.339	100	11.297	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		100		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pembinaan Atlet Berprestasi	%	100	12.204	100	31.488	Dinas Pemuda dan Olahraga
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan							
Tujuan 1: Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	68,46		68,46		
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	43,03		43,03		
	Indeks Kualitas Udara	Point	87,59		87,59		
	Indeks Kualitas Air Laut	Point	71,48		71,48		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%	24,24	369	24,242424	1.025	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi	10	1.020	30	2.835	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	lokasi	1	109	3	233	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	unit	210	109	210	232	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	usaha/ kegiatan	30	218	30	605	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan	%	10	228	10	632	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	kelompok	0	-	0	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan	20	231	60	641	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	69,70		69,70		
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%	100	22.201	100	61.711	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	10		30	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha	30.503	1.023	30.503	2.843	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	17,70	765	48,67	2.125	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS	4,00	5.143	4,00	14.296	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	90,31	1.444	90,31	3.018	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tujuan 1 : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Neraca pengelolaan sampah (%)	%	100,00		100,00		
Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	70,00		70,00		
	Persentase Pengurangan Sampah	%	30,00		30,00		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	%	100	5.794	100	15.916	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi							
Tujuan 1: Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli (Point)	%	75,56		75,56		
Sasaran 1: Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	17.814		17.814		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Perentase Peningkatan Minat Investasi	Persen	60	10	60	1.099	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	Persen	100,00	1.050	100	2.629	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	93	780	93	1.954	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah	Persen	60	1.080	60	2.703	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	Persen	100	171	100	428	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sasaran 2: Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,88		23,88		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Populasi Ternak	%	10	46.161	10	135.417	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan	%	100	582	100	1.708	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS	%	< 1	2.885	< 1	8.464	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	%	100	436	100	1.279	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Sarana Pertanian	%	2,05	24.040	2,05	64.205	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian	%	96,79	83.007	96,79	267.361	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Pengembangan industrialisasi pertanian	Unit/ paket	2		10	-	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%	96,5	434	96,5	1.229	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%	100	6.731	100	18.895	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	10		30	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	9,5	5.553	9,5	15.330	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	256.572	9.895	256.572	11.895	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.243.385	6.021	1.243.385	32.729	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%	99,93	2.129	99,93	8.943	Dinas Kelautan dan Perikanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	215700	929	215700	2.897	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sasaran 3: Meningkatnya jaminan kehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%)	%	100		100		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kehatan yang terakreditasi	%	85		85	-	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	%	100	803	100	2.356	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	4,5	18.207	4,5	53.398	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	12.713	100	37.284	Dinas Sosial
Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	87,20		87,20		
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan	%	86,62	255	86,62	771	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	100	4.170	100	11.466	Dinas Ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	%	4,77	425	3,77	1.142	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%	90,00	639	90,00	1.857	Dinas Ketahanan Pangan
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan	Cakupan Air Minum	%	80,59		80,59		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
dasar bagi penduduk miskin							
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan air minum	%	80,59	3.950	80,59	10.224	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	82,46		82,46		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	100		100	-	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha	84.511	167.445	253391,4	587.291	Dinas Perumahan dan Permukiman
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Rasio Elektrifikasi	%	99,99		99,99		
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	%	5,57	791	5,57	1.992	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	99,99	2.203	99,99	5.546	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	68,95		68,95		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%	100	2.595	100	7.064	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Rumah tangga menempati hunian layak	%	98,91		98,91		
Sasaran 6: Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0		3,0 - 4,0		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawas an Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol	%	80	305	80	874	Dinas Perdagangan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	dan Barang Pokok Penting						
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	4	1.804	4	5.179	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%	7	1.418	7	4.071	Dinas Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Penyelesaian Sengketa	%	90	1.364	90	3.915	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%	100	13.080	100	37.550	Dinas Perdagangan
Sasaran 7: Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita (Rp.000)	Rp.000	11.944		11.944		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	640	100	4.834	Dinas Perdagangan
Tujuan 2: Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB (%)	%	4,50		4,50		
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)	Rp. Miliar	137,24		137,24		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase desa wisata yang dikembangkan	%	100	6.084	100	16.580	Dinas Pariwisata
	Persentase Geosite yang tertata	%	50		50	-	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	orang		2.705		7.392	Dinas Pariwisata

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	%		232		607	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%		1.283		3.506	Dinas Pariwisata
Tujuan 3: Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri (%)	%	9,00		9,00		
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar)	Rp. Milyar	179,91		179,91		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%	100	39.972	100	102.322	Dinas Perindustrian
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Meningkatkan dari Kecil ke Menengah	%	3,55	1.179	3,55	3.018	Dinas Perindustrian
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1	798	1	2.043	Dinas Perindustrian
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha	%	6,71	1.929	6,71	4.807	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya	%	56,75	3.198	56,75	7.967	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	4.339	100	11.297	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		100		
Sasaran 2: Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,17		3,17		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	18	1.420	18	3.482	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	57,48	1.284	57,48	3.391	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%	23	388	23	1.026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%	23	1.313	23	3.466	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan							
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Kriminalitas	Point	13,25		13,25		
Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	0,00		0,00		
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%	10	562	10	1.527	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	11,43	4.092	11,43	11.105	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%	100	107.560	100	292.643	Biro Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Adat Aktif	%	70	9.635	70	24.519	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	Persentase Bumdes Berprestasi	%	37		37	-	
	Persentase Pokja Posyandu aktif	%	100		100	-	
	Persentase Posyantek yang aktif	%	64,96		64,96	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%	81,82	2.257	81,82	6.405	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%	100	529	100	1.427	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah	%	100	283	100	720	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	6,07		6,07		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100,00	4.648	100,00	11.445	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00		100,00		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	%	86,21	898	86,21	2.437	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	%	100	2.105	100	5.728	Biro Hukum
	Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi	%	100		100		
	Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi	%	100		100		
	Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat	%	100		100		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	%	100		100		
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi	%	100		100		
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	%	100		100		
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Partisipasi Politik Masyarakat (%)	%	85,20		85,20		
Sasaran 3: Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	1,00		1,00		
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	100	33.721	100	43.528	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	%	83,01	601	83,01	1.631	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	61,4		61,4		
Sasaran 4: Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	20,47		20,47		
	Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	%	100		100		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	65,28	2.440	65,28	6.231	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	%	83,07	1.111	83,07	2.837	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Ketahanan Keluarga	%	5,5	525	15	1.341	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Gender		1	91	1	201	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	100,00	618	42,00	1.491	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA	%					
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%		878		2.124	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif	%					

BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2023 TRIWULAN II

4.1 Capaian RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sampai Tahun 2023

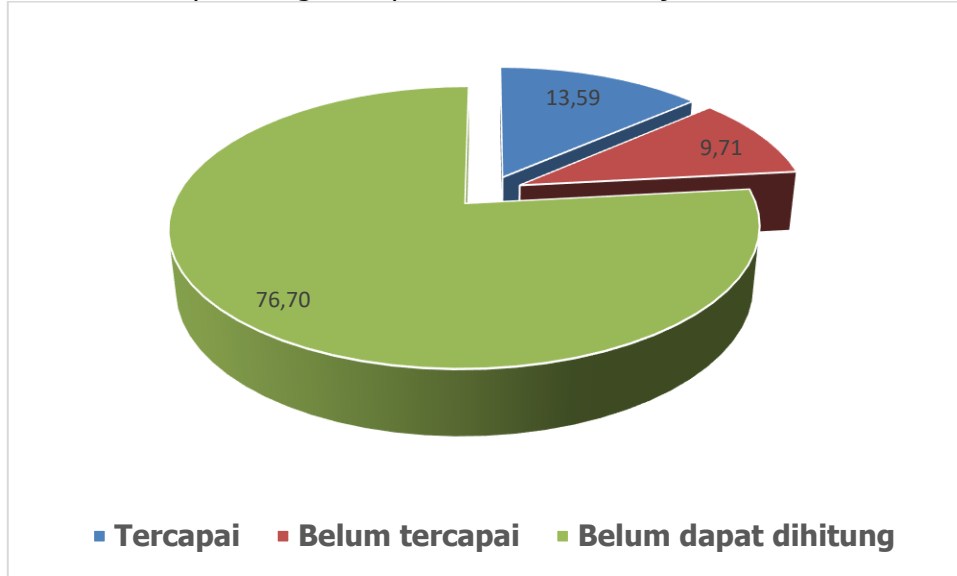
Laporan evaluasi RKPD Triwulan II merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan II Tahun 2023. Evaluasi ini mengacu pada RKPD Tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 Indikator Kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.991.980.923.513.

Hasil capaian kinerja sampai Triwulan II tahun 2023 dapat dideskripsikan bahwa dari 120 program prioritas pembangunan daerah, rata-rata capaian kinerja sebesar 39,25 persen dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.980.881.515.948 atau 33,06 persen. Dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan, telah ditetapkan sebanyak 103 Indikator Kinerja Daerah (IKD) tersebut sampai dengan tahun 2021 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sesuai dengan RPJMD 2019-2023, diketahui bahwa terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja utama yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Sebanyak 4 indikator atau 10,81 persen telah sesuai bahkan melampaui target tahun 2023, sedangkan 5 indikator atau 13,51 persen belum mencapai target. Sisanya sebanyak 28 indikator atau 75,68 persen belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Indikator yang sudah sesuai bahkan melampaui target yaitu Indeks Kapasitas Daerah; Opini BPK; Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD; dan Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan.

Proporsi tingkat capaian Indikator Kinerja Utama



Sumber: Perangkat Daerah, data diolah

Tabel 1. Target dan Realisasi Berdasarkan Sasaran Pembangunan Tahun 2019-2023

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2017-2021					2022			Triwulan II 2023			
							2017	2018	2019	2020	2021	Target	Capaian	% Tingkat Capaian	Target	Capaian	% Tingkat Capaian	
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (Point)			Point	142,90	139,4	129	128,05	122,3	119,41	119,83	99,65	115,83	0,00	0,00	
				Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,53	0,55	0,57	0,63	0,63	0,63	0,72	114,29	0,72	0,72	114,29	
		Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas			Point	73,69	74,6	76,02	77,77	78,81	79,84	81,31	101,84	81,17	0,00	0,00	
				Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	%	77,16	83,65	80,28	80,05	84,01	85,36	85,36	100,00	86,60	0,00	0,00	
					Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50,54	50,63	50,76	57,07	50,88	52,17	54,50	104,47	54,50	0,00	0,00	
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	73,72	74,76	78,64	90,29	88,00	86,86	92,00	105,92	89,14	0,00	0,00	
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Point	CC	CC	B	B	B	BB	B	95,67	BB	0,00	0,00	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	32,15	33,77	34,77	35,09	35,46	36,97	43,18	116,80	38,65	48,12	124,50	
				Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	B (>60 - 70)	B (62,53)	BB	B	BB	BB (76,01 - 80,00)	BB	100,00	A (80,01 - 90,00)	0,00	0,00	
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,57	0,60	0,54	0,59	0,69	0,70	0,64	91,29	0,72	0,00	0,00	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	3,42	4,56	3,63	3,56	3,54	4,53	3,71	81,90	4,55	0,00	0,00	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2017-2021					2022			Triwulan II 2023		
							2017	2018	2019	2020	2021	Target	Capaian	% Tingkat Capaian	Target	Capaian	% Tingkat Capaian
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan			Point	70,08	70,57	71,20	71,55	71,83	72,43	72,42	99,99	73,05	0,00	0,00
				Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,55	65,75	66,28	66,51	66,69	67,08	67,07	100,00	67,48	0,00	0,00
					Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	37,20	33,49	25,50	23,33	19,23	30,99	16,84	145,66	30,49	0,00	0,00
		Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan			Point	60,39	60,85	61,68	62,42	63,21	62,74	64,14	102,24	63,10	0,00	0,00
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,51	13,57	13,7	13,90	13,73	13,96	101,68	13,79	0,00	0,00
					Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,90	6,93	7,27	7,31	7,38	7,04	7,61	108,10	7,07	0,00	0,00
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Point	56,99	75,16	64,56	70,83	69,89	68,22	70,56	103,76	68,25	0,00	0,00
				Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	20,25	74,63	40,23	50,98	45,10	42,93	43,39	101,07	43,03	0,00	0,00
					Indeks Kualitas Udara	Point	88,02	87,17	87,40	88,63	88,52	87,56	89,30	101,99	87,59	0,00	0,00
					Indeks Kualitas Air Laut	Point	-	-	-	67,49	80,22	70,89	89,48	102,11	87,66	0,00	0,00
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	61,27	66,56	65,67	44,82	65,59	68,70	65,61	95,50	69,70	0,00	0,00
		Neraca pengelolaan sampah			%	-	-	41,71	44,82	49,02	85,00	54,98	64,68	100,00	0,00	0,00	
			Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	-	-	34,91	37,63	39,68	60,00	42,20	70,33	70,00	0,00	0,00	
				Persentase Pengurangan Sampah	%	-	-	6,80	7,19	9,34	25,00	12,78	51,12	30,00	0,00	0,00	
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli			Point	69,76	70,99	72,03	71,19	71,27	74,68	72,15	96,61	75,56	0,00	0,00
				Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	11.280	14.000	10.024	11.600	14.879	15.428	21606,67	140,05	68201,79	7835,00	11,49
				Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	22,03	23,51	23,06	23,2294016	26,4	23,71	26,14	110,25	23,88	27,20	113,90
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan	%	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2017-2021					2022			Triwulan II 2023		
							2017	2018	2019	2020	2021	Target	Capaian	% Tingkat Capaian	Target	Capaian	% Tingkat Capaian
	pertanian, pariwisata dan industrialisasi			penduduk miskin	jaminan sosial dan kesehatan												
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	77,80	78,30	85,30	91,30	90,40	86,70	93,30	107,61	87,20	0,00	0,00
				Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	-	70,48	72,59	74,88	78,76	78,45	79,11	100,84	80,59	0,00	0,00
					Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	69,25	69,53	78,8	91,36	87,78	80,91	81,83	101,14	82,46	0,00	0,00
					Rasio Elektrifikasi	%	85,10	93,83	99,55	99,98	99,98	99,88	99,98	100,10	99,99	0,00	0,00
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	53,04	56,75	56,35	62,53	63,47	65,80	62,30	94,68	68,95	0,00	0,00
				Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,70	3,16	1,87	0,68	2,12	3,0 - 4,0	6,23	44,25	3,0 - 4,0	0,25	-8,33
				Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita	Rp.000	9.877	9.917	10.640	10.351	10.377	11.604	10681,00	92,05	11.944	0,00	0,00
		Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)			%	7,27	-4,59	-0,08	-28,24	1,35	3,00	24,68	822,67	4,50	14,37	319,33
				Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	112,36	76,13	117,2	-444,54	15,20	129,78	282,70	217,83	137,24	49,35	35,96
		Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri			%	2,00	2,00	4,57	7,08	6,75	7,50	7,40	98,67	9,00	3,26	36,22
				Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	240,99	56,28	165	-110,55	94,66	173,02	87,99	50,86	179,91	-2,43	-1,35

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2017-2021					2022			Triwulan II 2023		
							2017	2018	2019	2020	2021	Target	Capaian	% Tingkat Capaian	Target	Capaian	% Tingkat Capaian
				Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,32	3,72	3,42	4,22	3,01	3,19	2,89	109,40	3,17	3,73	82,33
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkeadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminalitas			Point	18,05	17,25	12,71	13,09	10,67	14,05	8,77	137,58	13,25	0,00	0,00
				Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	8,70	38,10	46,15	57,14	25	20,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00
			Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	4,45	4,65	4,88	52,78	31,21	5,72	22,53	393,88	6,07	0,00	0,00	
			Partisipasi politik masyarakat			%	78,44	77,50	82,80	80	NA	84,57	80,00	94,60	85,20	0,00	0,00
				Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,40	0,50	0,60	0,65	0,61	0,90	1,26	140,00	1,00	0,00	0,00
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Point	59,95	60,06	55,81	51,96	52,01	61,16	53,12	86,85	61,40	0,00	0,00
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	17,79	17,93	18,60	26,87	27,24	19,27	27,39	142,14	20,47	0,00	0,00
					Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	0	10	40	40	50	80	70,00	87,50	100,00	0,00	0,00

Pencapaian sasaran pembangunan daerah periode 2019-2023 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

I. Pencapaian Tujuan Pembangunan

Dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, dari 6 Misi pembangunan, terdapat 10 (sepuluh) tujuan pembangunan dengan 13 indikator kinerja daerah. Sampai dengan tahun 2022 terdapat 4 tujuan pembangunan daerah yang telah memenuhi bahkan melampaui target akhir pembangunan pada tahun 2023, 5 tujuan dengan capaian on the track dengan tingkat capaian diatas 85% dan satu tujuan yang masih rendah pencapaiannya. Pencapaian tujuan pembangunan berdasarkan Misi Pembangunan 2019-2023 dapat dideskripsikan sebagai berikut: yaitu tujuan pembangunan Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan dengan indikator kinerja Indeks Aksesibilitas dari kondisi awal 74,60 pada tahun 2018 meningkat menjadi 81,31 poin pada tahun 2022 dengan target akhir pada tahun 2023 sebesar 81,17 poin atau dengan tingkat capaian sebesar 100,17%. Pencapaian ini didorong adanya Peraturan Daerah no 77 tahun 2022 tentang pembangunan infrastruktur jalan tahun jamak, meningkatnya akses air minum, rasio elektrifikasi, akses sanitasi, konektivitas antar wilayah, kemantapan irigasi, serta akses rumah layak huni. Kemudian tujuan pembangunan Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing dengan indikator kinerja Indeks Pendidikan dari 60,85 pada tahun 2018 meningkat menjadi 64,14 pada tahun 2022 dengan target akhir pada tahun 2023 sebesar 63,10.

Adapun tujuan pembangunan lain yang melampaui target adalah Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana capaian tahun 2018 sebesar 56,99 meningkat menjadi 70,56 pada tahun 2022 dengan target akhir pada tahun 2023 sebesar 68,46. Selain itu tujuan pembangunan Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan dengan indikator kinerja Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) juga mengalami peningkatan yg sangat signifikan dari kontraksi 4,59% pada tahun 2018 meningkat menjadi 24,68%

II. Pencapaian Sasaran Pembangunan

- I. Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana, dengan indikator kinerja Indeks Kapasitas Daerah. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 0,63 Point dengan realisasi 0,72, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 114,29%.

Untuk meningkatkan kapasitas dalam penanggulangana bencana, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2022 yaitu meningkatkan pelayanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana, meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta meningkatkan penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Sampai dengan tahun 2022, Persentase perangkat daerah di provinsi NTB yang telah menerapkan kegiatan penanggulangan bencana sudah mencapai 100%, serta tetap meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana di lingkup perangkat daerah provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kota.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana BPBD provinsi NTB memiliki 1 (satu) program kegiatan yaitu program penanggulangan bencana. Program ini dilaksanakan dalam upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana untuk mendukung penanggulangan bencana melalui beberapa kegiatan yaitu:

- Memfasilitasi Desa Tangguh Bencana
- Memfasilitasi Sekolah / Madrasah Aman Bencana
- Pelatihan Pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA)
- Menyusun dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana)
- Menyusun dokumen rencana kontijensi.
- Menyiapkan sarana dan prasarana beserta data laporan korban bencana
- Melakukan pemindahan warga/masyarakat dari zona berisiko bencana ke lokasi yang lebih aman
- Melakukan pencarian dan evakuasi korban terdampak bencana
- Penyediaan dan pendistribusian logistik sesuai dengan kebutuhan korban terdampak bencana
- Pengelolaan data dan informasi terkait kebencanaan.

2. Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah, dengan indikator kinerja Persentase Kemantapan jalan dan Persentase Kemantapan Sistem Irigasi. Pada tahun 2022, Persentase Kemantapan jalan ditargetkan sebesar 85,36% dengan realisasi 85,36%, sesuai target dengan tingkat capaian sebesar 100%. Sedangkan Persentase Kemantapan Sistem Irigasi ditargetkan sebesar 52,17% dengan realisasi 54,50%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 104,47%

Ralisasi capaian tingkat kemandirian jalan provinsi pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar 80,05 %. Realisasi capaian tersebut dapat dipertahankan pada tahun berikutnya yakni tahun 2021 dan 2022 yang mengalami kenaikan secara signifikan sebesar 84,01 % dan 85,36 %, hal ini tercapai karena adanya dukungan penanganan jalan melalui program percepatan jalan (Perda Percepatan Jalan) yang berasal dari pembiayaan APBD dan penanganan jalan dengan pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan dan dipelihara pada tahun 2022 mencapai 540,56 Km, sehingga Panjang jalan dalam kondisi mantap mencapai 1.247,07 Km atau 85,36% dari total Panjang jalan 1.484,43 Km. sementara itu Kemandirian Sistem Irigasi sebagian besar didukung melalui dana alokasi khusus. Pada Tahun 2022, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2015 untuk mengelola 35 Daerah Irigasi dengan luasan 1.000 Ha – 3.000 Ha. Secara keseluruhan terdapat 58.105 Ha luasan kewenangan daerah irigasi yang dikelola. Adapun Panjang saluran dari 35 Daerah Irigasi tersebut adalah 721,95 kilometer dengan saluran dalam kondisi baik sepanjang 413,05 Km (57 %), rusak ringan 61,78 km (9 %), rusak sedang 86,05 km (12 %) dan rusak berat 161,03 km (22 %).

Adapun cakupan air minum, dapat ditingkatkan cakupannya pengelolaan SPAM dengan Jumlah SPAM yang dikelola dan dikembangkan sebanyak 30 unit dengan jumlah sambungan rumah/KK terlayani SPAM Jaringan perpipaan yang dibangun pada tahun 2022 sebanyak 8.010 KK

3. Meningkatnya konektivitas antar wilayah, dengan indikator kinerja Persentase konektivitas transportasi publik. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 86,86% dengan realisasi 88,57%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 101,97%.

Pencapaian konektivitas antar di wilayah didukung oleh peningkatan persentase rute angkutan darat dan angkutan laut. Pada tahun 2022, persentase angkutan darat telah mencapai 98,33% dengan rute angkutan darat di NTB sudah terpenuhi sejumlah 122 rute dengan penambahan 2 (dua) rute angkutan yakni 1 (satu) rute angkutan perintis yaitu rute Terminal Mandalika – Leweng dan 1 (satu) rute angkutan KSPN dengan rute BIZAM – Epicentrum Mall – Pantai Senggigi – Pelabuhan Bangsal. Adapun angkutan laut mencapau 84,62% dengan jumlah rute yang terpenuhi sejumlah 22 (dua puluh dua) rute dengan penambahan 1 (satu) rute angkutan Bali – Tawun

II. Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah, dengan indikator kinerja Opini BPK. Pada tahun 2022 ditargetkan mempertahankan Opini BPK WTP dengan realisasi WTP, sesuai target dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah Opini Audit yang diterbitkan jika Laporan Keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika Laporan Keuangan diberikan opini artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, walaupun ada kesalahan dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembalikan keputusan. Di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah memenuhi kriteria:

- Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan;
- Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- Efektifitas Sistem Pengendalian Intern, yaitu meliputi Keberadaan Aset, Kelengkapan Bukti dan Nilai Aset.

Pencapaian WTP Provinsi NTB merupakan Prestasi yang ke-11 secara berturut-turut dari tahun 2011-2022

2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, dengan indikator kinerja Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 36,97% dengan realisasi 43,18%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 116,80%.

Target PAD tahun 2022 yang semula sebesar Rp2.571.637.450.300,- bertambah dalam anggaran perubahan menjadi Rp2.735.041.230.300,- dan kemudian direvisi kembali menjadi Rp2.738.892.515.300,-. Target PAD tersebut merupakan 48,30 persen dari keseluruhan target Pendapatan Daerah Provinsi NTB sebesar Rp5.670.486.399.401,- Sampai akhir tahun anggaran 2022, realisasi penerimaan PAD telah mencapai Rp2.287.653.655.567,- atau 83,52 persen dari target tahun 2022 dan meningkat 21,14 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan PAD sebagian besar bersumber dari peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan BLUD.

Penerimaan PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. Meningkatnya

Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan indikator kinerja Nilai SAKIP. Pada tahun 2022, kategori BB dengan realisasi BB, sesuai target dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi NTB oleh KemenPAN RB pada tahun 2022 menunjukkan nilai 72,77 dengan "predikat B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sangat baik yang ditandai dengan meningkatnya beberapa komponen yang dinilai antara lain perencanaan kinerja yang mencakup RPMD, Renstra, PK dan Dokumen lainnya telah disusun dengan baik dan telah dibuat secara berjenjang (cascading) oleh seluruh perangkat daerah sampai ke level operasional. Dalam pengukuran kinerja, telah dilakukan secara berkala triwulanan atas pencapaian kinerja dengan mengacu pada rencana aksi yang telah disusun. Sementara itu, dalam hal pelaporan kinerja, pemerintah provinsi telah menyusun akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sesuai yang telah diperjanjikan dan telah dipublikasi dalam website PPID. Sedangkan terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi NTB untuk mengevaluasi implementasi SAKIP pada seluruh perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur NTB nomor 77 tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

3. Meningkatnya Profesionalisme ASN, dengan, dengan indikator kinerja Indeks Profesionalisme ASN. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,70 point dengan realisasi 0,51 point, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 72,86%.
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 4,53 point dengan realisasi 3,71 point, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 81,90%.

III. Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat, dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup dan Persentase Balita *Stunting*. Pada tahun 2022, Angka Harapan Hidup ditargetkan 67,08 tahun dengan realisasi 67,07 tahun, sesuai target dengan tingkat capaian sebesar 100%. Sedangkan Persentase Balita *Stunting* ditargetkan 30,99% dengan realisasi berdasarkan survey EPPGBM sebesar 16,99%, melalui target dengan tingkat capaian sebesar 145,18%.

2. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan Pendidikan, dengan indikator kinerja Harapan Lama Sekolah dan Rata rata Lama Sekolah. Pada tahun 2022, Harapan Lama Sekolah ditargetkan sebesar 13,73 tahun dengan realisasi 13,96 tahun, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 101,68%. Sedangkan Rata rata Lama Sekolah ditargetkan sebesar 7,04 tahun dengan realisasi 7,61 tahun, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 108,10%
- IV. Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
1. Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Pada tahun 2022, Indeks Kualitas Air ditargetkan sebesar 42,93 point dengan realisasi 43,39 point, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 101,07%. Indeks Kualitas Udara ditargetkan sebesar 87,56 point dengan realisasi 89,30 point, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 101,99%. Indeks Kualitas Air Laut ditargetkan sebesar 70,89 point dengan realisasi 89,48 point, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 102,11%. Sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan ditargetkan sebesar 68,70 point dengan realisasi 65,61 point, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 95,50%.
 2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan, dengan indikator kinerja Persentase Penanganan Sampah dan Persentase Pengurangan Sampah. Pada tahun 2022, Persentase Penanganan Sampah ditargetkan sebesar 60% dengan realisasi 42,20%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 70,33%. Sedangkan Persentase Pengurangan Sampah ditargetkan sebesar 25% dengan realisasi 12,78%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 51,12%.
- V. Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
1. Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha), dengan indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 15,43 Triliun dengan realisasi sebesar Rp.21,61 Triliun, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 140,05%.
 2. Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas, dengan indikator kinerja Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan. Pada tahun 2023

ditargetkan sebesar 23,88% dengan realisasi sebesar 22,06 dengan tingkat capaian sebesar 92,38%.

3. Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin, dengan indikator kinerja Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 100%.
4. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan, dengan indikator kinerja Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 86,70 poin dengan realisasi sebesar 106,99%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 123,40%.
5. Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin, dengan indikator kinerja Cakupan Air Minum, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Rasio Elektrifikasi, dan Cakupan Rumah Layak Huni (RLH). Pada tahun 2022, Cakupan Air Minum ditargetkan sebesar 78,45% dengan realisasi sebesar 95,40%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 121,61%. Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak ditargetkan sebesar 80,91% dengan realisasi sebesar 83,12%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 102,73%. Rasio Elektrifikasi ditargetkan sebesar 99,88% dengan realisasi sebesar 99,98%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 100,10%. Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) ditargetkan sebesar 65,80% dengan realisasi sebesar 62,30%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 94,68%.
6. Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok, dengan indikator kinerja Inflasi. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 3,0 - 4,0% dengan realisasi sebesar 6,23%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 44,25%.
7. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan indikator kinerja Pengeluaran per kapita. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 11,60 juta dengan realisasi sebesar Rp. 10,68 juta, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 92,05%.
8. Meningkatnya daya saing pariwisata, dengan indikator kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum). Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 137,24 miliar dengan realisasi sebesar Rp. 13,80 miliar, belum memenuhi target dengan tingkat capaian 10,06%.
9. Meningkatnya daya saing industri, dengan indikator kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.179,91 miliar dengan realisasi sebesar Rp.31,50 miliar, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 17,51%.

10. Menurunnya pengangguran terbuka, dengan indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 3,17% dengan realisasi sebesar 3,73%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 82,33%.

VI. Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

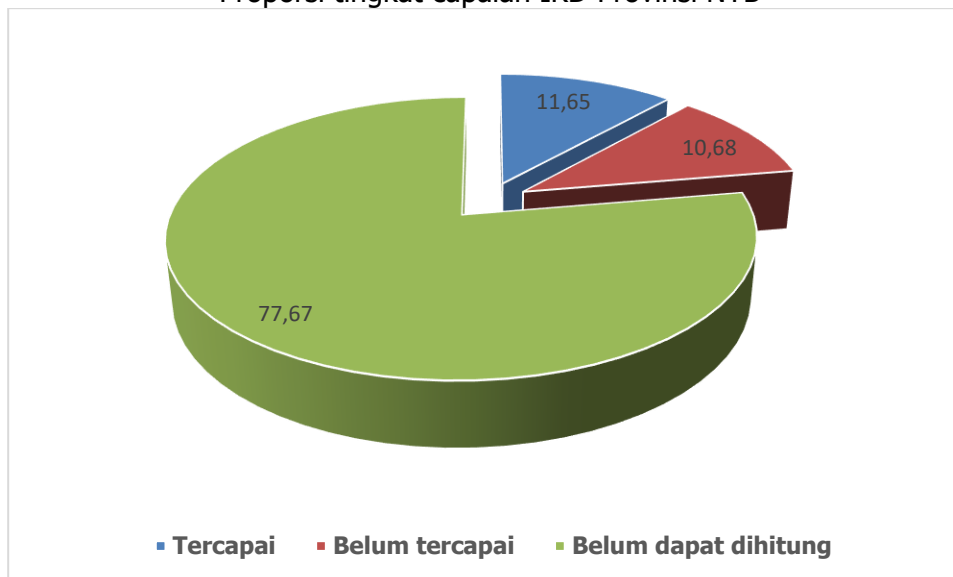
1. Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat, dengan indikator kinerja Persentase penurunan konflik sosial. Pada tahun 2022 ditargetkan menurun sebesar 20% dengan realisasi meningkat sebesar 50%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 50%.
2. Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah, dengan indikator kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah. Pada tahun 2022 ditargetkan menurun sebesar 5,72% dengan realisasi menurun sebesar 55%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 961,54%.
3. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat, dengan indikator kinerja Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,90% dengan realisasi sebesar 0,80%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 88,89%.
4. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan indikator kinerja Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan dan Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak. Pada tahun 2022, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan ditargetkan sebesar 19,27% dengan realisasi sebesar 27,13%, memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 140,79%. Sedangkan Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak ditargetkan sebesar 80% dengan realisasi sebesar 70%, memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 87,50%

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah

Salah satu parameter keberhasilan pembangunan yang menunjukkan gambaran pencapaian pembangunan Daerah dan sebagai tolok ukur sejauh mana program-program yang digulirkan Pemerintah dapat mencapai sasaran-sasaran atau tujuan pembangunan, dapat diukur melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKD juga sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB dari kondisi awal sampai akhir periode RPJMD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Noor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Proporsi tingkat capaian IKD Provinsi NTB



Sumber: Perangkat Daerah, data diolah

Indikator Kinerja Daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah. Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 103 indikator untuk mendeskripsikan ukuran kinerja daerah yang telah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek kinerja yaitu :

1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Adapun capaian indikator kinerja daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut:

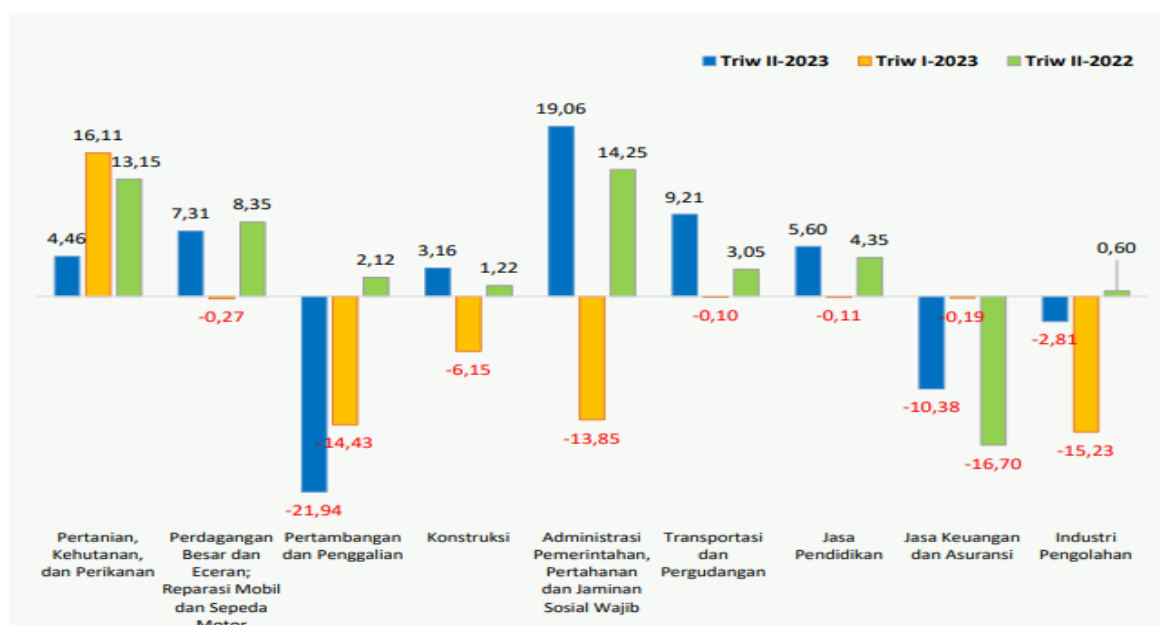
Capaian Indikator pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambahan Bijih Logam	%	4,5-5,5	4,11	91,33
2	Inflasi	%	3,0 - 4,0	0,25	-8,33
3	Tingkat Kemiskinan	%	11,92	13,85	83,81
4	Gini Ratio	Point	0,297	0,375	73,74
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	70,09		

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2023

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Triwulan II Tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,11 persen (tidak termasuk pertambangan bijih logam). Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial sebesar 19,06 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,20 persen dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi terdalam sebesar -35,26 persen.

Gambar Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)



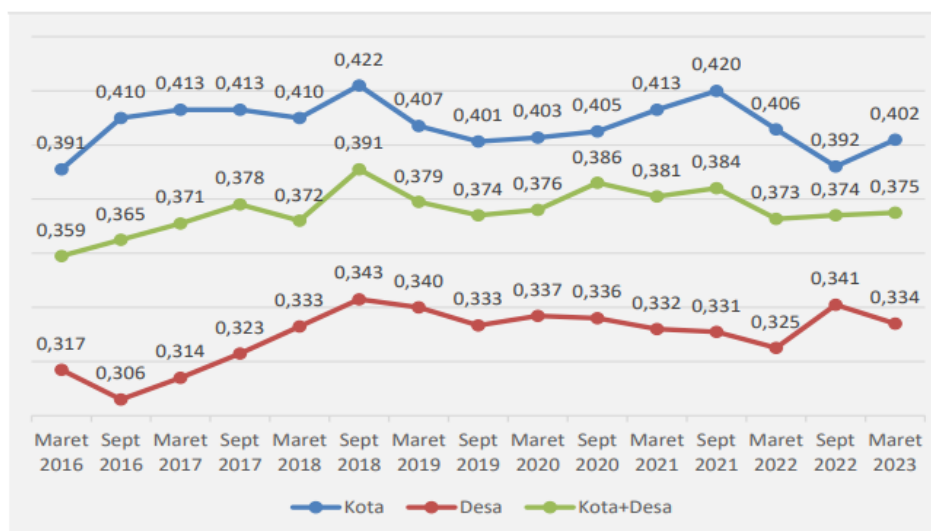
Pada indikator kemiskinan mengalami peningkatan dibanding September 2022. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 13,85 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap September 2022 dan meningkat sebesar 0,17 persen terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 751,23 ribu orang, bertambah 6,54 ribu orang terhadap September 2022 dan bertambah 19,29 ribu orang terhadap Maret 2022. Capaian tersebut masih berada di atas target penurunan kemiskinan tahun 2023 dalam RPJMD NTB Tahun 2019-2023 yang ditetapkan berada pada rentang 4,5-5,5 persen.

Gambar Profil Kemiskinan Provinsi NTB



Pada sisi tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur oleh Gini Ratio, gini rasio penduduk NTB pada Maret tahun 2023 tercatat sebesar 0,375 atau mengalami peningkatan 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,374. Dalam sepuluh tahun terakhir, nilai *Gini Ratio* provinsi NTB berfluktuasi dalam rentang yang cukup stabil, yaitu diantara 0,348 sampai 0,391. Nilai tertinggi *Gini Ratio* NTB adalah 0,391 yaitu pada September 2014 dan September 2018. Sedangkan nilai terendah adalah 0,348 yaitu pada September 2012. Berdasarkan daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,402, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,392 dan turun dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,406. Kemudian untuk daerah perdesaan, pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,334, turun dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,341 dan naik dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,325.

Gambar Perkembangan Gini Ratio, Maret 2016 - Maret 2023



Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,34 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,21 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 19,91 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

2. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya saing Provinsi NTB diukur menggunakan pendekatan 7 indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 1. Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Indeks Kriminalitas	Point	13,25		
2	Indeks Aksesibilitas	Point	81,17		
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	68,25		
4	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana	%	90,31		
5	Indeks Risiko Bencana	Point	115,83		
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	BB		
7	Indeks Pelayanan Publik	Point	4,55		

Sumber: Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2023

Terdapat 7 indikator untuk mengukur aspek daya saing daerah, yaitu Indeks Kriminalitas, Indeks Aksesabilitas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) , Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana, Indeks Resiko Bencana dan Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Pelayanan Publik. Seluruh indikator pada Aspek Daya Saing Daerah capaiannya belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan mewujudkan kondusifitas daerah, menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menyiapkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mewujudkan pelayanan publik yang paripurna.

3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum diukur dengan 91 indikator kinerja yang terdiri dari urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 21 indikator, urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 32 indikator, urusan pilihan sebanyak 20 indikator, serta fungsi penunjang urusan sebanyak 18 indikator. Adapun capaian indikator-indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Capaian Indikator pada Aspek Pelayanan Umum

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
C	ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1.01	Pendidikan				
1	Indeks Pendidikan	Point	63,10		
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,79		
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,07		
1.02	Kesehatan				
4	Indeks Kesehatan	Point	73,05		
5	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	83,00		
6	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	82,46		
7	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,48		
8	Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	30,49		
9	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	%	100		
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
10	Persentase Kemantapan jalan	%	86,60		
11	Cakupan Air Minum	%	80,59		
12	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	54,50		
13	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	%	27,20		
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
14	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	68,95		
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
15	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	6,07		
15	Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas	%	100,00		
16	Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00		
17	Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana)	%	30,18		
18	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,65		
1.06	Sosial				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
19	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	%	100,00		
20	Persentase PMKS yang tertangani	%	5,37		
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
2.01	Tenaga Kerja				
21	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,17	3,73	82,33
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
22	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	61,40		
23	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	90,52		
24	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	Tahun	21,00		
25	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	20,47		
26	Cakupan Kabupaten/Kota yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	100,00		
2.03	Pangan				
27	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	87,20		
2.04	Lingkungan Hidup				
28	Indeks Kualitas Air	Point	43,03		
29	Indeks Kualitas Udara	Point	87,59		
30	Indeks Kualitas Air Laut	Point	87,66		
31	Neraca Pengelolaan Sampah (%)	%	100,00		
32	Persentase Penanganan Sampah	%	70,00		
33	Persentase Pengurangan Sampah	%	30,00		
2.05	Pertanahan				
34	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100,00	100,00	100,00
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
35	Rasio Penduduk BerkTP Persatuan Penduduk	rasio	0,88	0,96	109,09
35	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
36	Cakupan desa pesisir, dan lingkaran hutan yang diberdayakan	%	33,69	36,26	107,63
37	Persentase Desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri	%	91,00	93,05	102,25
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
38	Pertumbuhan Penduduk	%	0,95		
2.09	Perhubungan				
39	Persentase konektivitas transportasi publik	%	89,14		
2.10	Komunikasi dan Informatika				
40	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	Kualifikasi	Kolaborasi		
41	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	%	75		
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
42	Persentase Koperasi Aktif	%	70,00		
2.12	Penanaman Modal				
43	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	68.202	7.835	11,49
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				
44	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	Medali	210		
45	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15		
46	Proporsi wirausaha muda	%	68,39		
2.14	Statistik				
47	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas	%	65,00		
2.15	Persandian				
48	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level	III+		
2.16	Kebudayaan				
49	Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi	%	33,04		
2.17	Perpustakaan				
50	Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas)	%	100,00	100,00	100,00
51	Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul)	%	39,86	42,75	107,26
2.18	Kearsipan				
52	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	100,00	94,50	94,50
3	URUSAN PILIHAN				
3.01	Kelautan dan Perikanan				
53	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	%	4,74		
54	Produksi Perikanan	Ton	1.499.957		
55	Nilai Tukar Nelayan	%	>110		
3.02	Pariwisata				
56	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	%	4,50	14,37	319,33
57	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan	%	100,00		
58	Rata-rata Lama Menginap	hari	3,35	1,75	52,24
59	Angka kunjungan wisatawan	orang	23.100.000		
60	Persentase Geosites yang Tertata	%	50,00		
61	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Milyar	137,24	49,35	35,96
3.03	Pertanian				
62	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,88	27,20	113,90
63	Nilai Tukar Petani	Point	>105	115,1	100,00
3.04	Kehutanan				
64	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	69,70		
65	Cakupan Luas Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya	%	20,08		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral				
66	Rasio Elektrifikasi	%	99,99		
3.06	Perdagangan				
67	Indeks Daya Beli	Point	75,56		
68	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11.944		
3.07	Perindustrian				
69	Pertumbuhan Industri	%	9,00	3,26	36,22
70	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Milyar	179,91	-2,43	-1,35
71	Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah	%	3,55		
3.08	Transmigrasi				
72	Cakupan Penempatan Transmigran	%	100		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	Administrasi Pemerintahan				
73	Ranking Nasional LPPD	Ranking	3,0747		
74	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas	%	100,00		
75	Persentase Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	%	100,00		
76	Persentase unit pelayan publik perangkat daerah yang menerapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	%	45,00		
77	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level	4		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	Perencanaan				
78	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	%	100,00	100,00	100
5.02	Keuangan				
79	Opini BPK	Status	WTP	WTP	100
80	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Point	0,54		
81	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	38,65	48,12	124,50
5.03	Kepegawaian				
82	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,72		
5.04	Pendidikan dan Pelatihan				
83	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	Point	0,28		
5.05	Penelitian dan Pengembangan				
84	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	%	30,00		
5.06	Penghubung				
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01	Pengawasan				
86	Nilai SAKIP	Kategori	A (80,01 - 90,00)		
7	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
7.01	Kesatuan Bangsa dan Politik				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
87	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	4,89		
88	Partisipasi Politik Masyarakat	%	85,20		
89	Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter	%	50,00		
90	Persentase penurunan konflik sosial	%	0,00		
91	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	1,00		

Sumber: BPS Provinsi NTB, OPD Penanggungjawab Indikator, 2023

Ket. NA= Not Available

Dari 91 indikator untuk mengukur aspek pelayanan umum, terdapat 12 indikator tercapai atau memenuhi target bahkan melampaui target, sedangkan 7 indikator belum memenuhi target, dan masih terdapat 72 indikator belum tersedia (Not Available) karena belum dapat dihitung atau menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Indikator yang sudah tercapai atau memenuhi target bahkan melampaui target yaitu Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi; Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk; Cakupan desa pesisir dan lingkaran hutan yang diberdayakan; Persentase Desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri; Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas); Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul); Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum); Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan; Nilai Tukar Petani; Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan; Opini BPK; dan Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD.

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dimana pemerintah provinsi NTB dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik tahunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renja perangkat daerah Provinsi NTB Tahun 2023 maupun lima tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023 harus mengetahui progres dan tingkat capaian secara berkala dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan.
2. Laporan evaluasi RKPD Triwulan II merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan II Tahun 2023. Evaluasi ini mengacu pada RKPD Tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 Indikator Kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.991.980.923.513.
3. Hasil capaian kinerja sampai Triwulan II tahun 2023 dapat dideskripsikan bahwa dari 120 program prioritas pembangunan daerah, rata-rata capaian kinerja sebesar 39,25 persen dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.980.881.515.948 atau 33,06 persen. Rendahnya capaian kinerja disebabkan karena pekerjaan pada Triwulan II masih terfokus pada program kegiatan yang bersifat administratif, dan pembayaran hutang pada Tahun Anggaran 2022, serta adanya kebijakan penghentian sementara pelaksanaan kegiatan perangkat daerah tahun anggaran 2023 yang pendanaannya bersumber dari dana bebas seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bebas dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan III- IV tahun anggaran 2023.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan

37 indikator kinerja utama yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Sampai Triwulan II Tahun 2023, terdapat 9 indikator atau 24,32 persen telah dapat diukur pencapaiannya dimana sebanyak 4 indikator atau 10,81 persen telah sesuai bahkan melampaui target tahun 2023, sedangkan 5 indikator atau 13,51 persen belum mencapai target. Sisanya sebanyak 28 indikator atau 75,68 persen belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Indikator yang sudah sesuai bahkan melampaui target yaitu Indeks Kapasitas Daerah; Opini BPK; Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD; dan Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan.

5. Indikator Kinerja Daerah (IKD) juga sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB dari kondisi awal sampai akhir periode RPJMD. Terdapat 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2023, dimana sebanyak 23 Indikator sudah dapat diukur pencapaiannya dengan 12 indikator atau 11,65 persen sudah sesuai target bahkan melampaui, 11 indikator atau 10,68 persen belum memenuhi target. Sisanya sebanyak 80 indikator atau 77,67 persen belum tersedia (Not Available/NA) karena belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi umum yang diberikan terhadap hasil evaluasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Perlu dijabarkan program Prioritas dan Program Unggulan kedalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta kegiatan dan sub kegiatan unggulan serta menetapkan besaran target yang akan dicapai pada setiap prioritas daerah serta program prioritas dan program unggulan. Penjabaran ini perlu dilakukan pada saat dilakukan perubahan RKPD Tahun 2023;
2. Perlu dilakukan pemetaan program prioritas dan program unggulan dengan program perangkat daerah untuk memudahkan dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program prioritas dan program unggulan, karena program prioritas dan program unggulan secara nomenklatur berbeda dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;
3. Perlu dilakukan penyesuaian indikator dan target baik indikator dan target di Program maupun indikator kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023;
4. Perlu peningkatan Konsolidasi internal dan koordinasi antar stakeholders agar capaian kinerja dapat terus ditingkatkan, karena beberapa indikator tidak hanya dapat dicapai dengan dukungan APBD Provinsi;

5. Terhadap target-target yang belum tercapai agar dilakukan pengawalan dan memfokuskan penganggaran sehingga pencapaian target kinerja di tahun depan dapat diakselerasi;
6. Perlu mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan secara lebih intensif dan berkala sehingga dapat mengefektifkan pencapaian kinerja sesuai dengan yang ditargetkan.

CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS BERDASARKAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah														
Tujuan 1: Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Risiko Bencana		Indeks Risiko Bencana	Point											
Sasaran: Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana		Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,72		0,65	2.255.513.036	110,77	2.092.109.200	0,72	758.137.529	110,77		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase terbentuknya DESTANA & SMAB	%	40,09	14.445.499.395	40,09	2.835.269.700	40,09	916.909.200		159.639.029		17,41	Pelaksana BPBD
		Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	%	92,50		92,50		92,50						
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Tersusunnya Dokumen Perencanaan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana yang ditanggulangi	Dokumen	420	3.524.792.112	420	849.599.200	420	811.288.700		49.046.797		6,05	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	10	853.307.397	10	815.129.000	10	778.418.500		33.366.697		4,29	
	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah dokumen verifikasi pasca bencana	Dokumen	100	354.723.830	100	34.470.200	100	32.870.200		15.680.100		47,70	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Kejadian Bencana Yang tertangani	%	100	4.179.305.283	100	1.959.429.200	100	79.379.200		96.440.932		121,49	
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Persentase Penanganan Darurat Bencana	%	100	124.207.684	100	35.307.200	100	30.307.200		32.187.431		106,20	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi perjenis kejadian bencana	Orang	500	1.586.446.729	500	1.881.278.500	500	16.278.500		24.378.301		149,76	
		Persentase Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100		100		100						
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	500	2.468.650.870	500	42.843.500	500	32.793.500		39.875.200		121,59	
		Persentase Pendistribusian Logistik	%	100	129.970.171	100		100						
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang dapat dikelola	%	100	70.000.000	100	26.241.300	100	26.241.300		14.151.300			
	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	59.970.171	1	26.241.300	1	26.241.300		14.151.300			
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%	100	7.543.347.993	100	1.343.700.000	100	1.175.200.000		598.498.500		50,93	Dinas Sosial
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		Terlaksananya penanganan PMKS (korban bencana)	%	100		100	1.343.700.000	100	1.175.200.000		598.498.500			
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	1000		1000	300.000.000	1000	230.000.000		228.360.000		99,29	
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	1000		1000	50.000.000	1000						
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	1000		1000	235.000.000	1000	207.500.000		-		-	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	1000		1000	287.600.000	1000	271.600.000		102.672.900		37,80	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	1000		1000	471.100.000	1000	466.100.000		267.465.600		57,38	
												0,00	63,07	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
Tujuan 2: Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan		Indeks Aksesibilitas	Point											
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar		Persentase Kemantapan jalan	%	85,36		86,60	138.902.122.352	0,00		0,00		0,00		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Jalan Mantap	km	22,5	931.804.007.968	22,5	181.490.766.000	22,5	186.216.889.900		50.431.280.395		27,08	Dinas PUPR
Penyelenggaraan Jalan Provinsi		Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Km	541		541	181.490.766.000	541	186.216.889.900		50.431.280.395		27,08	
	Pembangunan Jalan	Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan dan dipelihara	%	87		87	150.000.000.000	87	130.000.000.000		36.249.808.816		27,88	
	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan dan dipelihara	%	87		87	14.496.551.800	87	14.944.444.700		37.302.911			
	Penggantian Jembatan	Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan dan dipelihara	%	87		87	16.994.214.200	87	17.570.000.000		55.169.068	100	49,11	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala jalan	%	87		87	18.008.189.500	87	23585634500		14.068.837.600	100	79,94	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						146.810.700		116810700		20.162.000		17,26	
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar		Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	54,50		54,50	146.894.637.594	0,00		0,00		0,00	100,00	38,06
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase kenaikan Areal Layanan Irigasi	%	76,28	342.401.082.017	76,28	135.767.379.250	76,28	1,46897E+11		58.322.474.735		39,70	Dinas PUPR
		Cakupan Pelayanan Areal Irigasi		78		78		78						
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Tercapainya ketersediaan Air Irigasi dan Air Baku	Lokasi	20		20	84.227.552.250	20	91.285.852.350		40.604.559.208			
		Jumlah SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Lokasi	90		90		90						
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya						213.640.000		213.640.000		310.000		0,15	
	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Tercapainya ketersediaan Air Irigasi dan Air Baku	%	76		76	16.097.590.000	76	16.340.590.000		5.422.412.700	-	33,18	
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Tercapainya ketersediaan Air Irigasi dan Air Baku	%	76		76	4.242.300.000	76	5.433.300.000		3.817.509.850	-	70,26	
	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Tercapainya ketersediaan Air Irigasi dan Air Baku	%	76		76	18.688.045.000	76	19.870.045.000		10.176.760.250			
	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi						154.207.250		154.207.250		60.088.250		38,97	
	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya						31.946.020.000		36.805.819.900		14.767.331.958		40,12	
	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola		78		78	12.885.750.000	78	12.468.250.200		6.360.146.200		51,01	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota							51.539.827.000		55.611.526.500		17.717.915.527			
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa						1.027.680.000		645.680.000		500.915.000		77,58	
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan						1.574.950.000		1.770.950.000		1.743.184.400		98,43	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						48.914.277.000		53.171.976.500		15.464.266.127		29,08	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Tahun 2023										Perangkat Daerah Penanggung	
				Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	Kinerja (%)	Keuangan (%)		
	Operasional Unit Pengelola Irigasi						22.920.000		22.920.000		9.550.000				
												0,00	47,85		
Sasaran 2: Meningkatnya konektivitas antar wilayah		Persentase konektivitas transportasi publik	%	92,00		89,14	8.140.263.807	0,00		0,00					
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	81.63 %	14.665.159.820	81.63 %	6.922.746.630	81.63 %	7845646630		438.254.152			5,59	Dinas Perhubungan
		Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	100 %		100 %		100 %							
		Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%	40 %		40 %		40 %							
		Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	52.58 %		52.58 %		52.58 %							
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi							5.960.000.000		6.872.004.000		52.658.100		-	0,77	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	1		1	5.960.000.000	1	6.872.004.000		52.658.100			0,77	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		Jumlah fasilitas pengelolaan terminal yang memadai	Dokumen	8		8	36.424.000	8	36.424.000		25.611.000			70,31	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Dokumen Fasilitas terminal type B yang terpelihara	Unit	1		1	36.424.000	1	36.424.000		25.611.000			70,31	
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		Jumlah Dokumen manajemen rekayasa Lalu lintas dan pelanggaran angkutan	Dokumen	12		12	684.941.100	12	685.837.100		216.096.052			31,51	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	laporan	3		3	430.078.100	3	430.974.100		180.053.652			41,78	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	laporan	60		60	254.863.000	60	254.863.000		36.042.400			14,14	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan	Unit	90		90	26.171.000	90	26.171.000		3.490.000			13,34	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	laporan	9		9	26.171.000	9	26.171.000		3.490.000			13,34	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Angkutan yang Memenuhi Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	Unit	400		400	140.046.630	400	150.046.630		94.397.000			62,91	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Unit	200		200	140.046.630	200	150.046.630		94.397.000			62,91	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)	KPS	200		200	75.163.900	200	75.163.900		46.002.000			61,20	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Unit	150		150	75.163.900	150	75.163.900		46.002.000			61,20	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%	66,06	2.260.753.150	66,06	200.987.800	66,06	300.987.800		175.451.104			58,29	Dinas Perhubungan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi	Unit	22		22	80.736.600	22	80.736.600		36.631.600		45,37	
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	laporan	22		22	80.736.600	22	80.736.600		36.631.600		45,37	
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		Jumlah Dokumen Badan usaha dipelabuhan yang diawasi	Dokumen	122		122	60.923.200	122	60.923.200		39.687.600		65,14	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	laporan	122		122	60.923.200	122	60.923.200		39.687.600		65,14	
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah pelabuhan yang diawasi	Pelabuhan	5		5	59.328.000	5	159.328.000		99.131.904		62,22	
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	laporan	5		5	59.328.000	5	159.328.000		99.131.904		62,22	
											0,00	43,52		
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi														
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Point											
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Opini BPK	Status	WTP		WTP	1.129.533.684.675	100,00		WTP		100,00		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	%	100	2.275.817.467.798,74	100	1.123.639.691.890	100	1.138.292.809.734	62,27	340.412.758.162	62,27	29,91	BPKAD
		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	%											
		Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Pe Dokumen APBD/ APBD dan Pertanggungjawaban APBD/APBD Provinsi	%		2.416.003.767		2.971.731.796			1				
		Persentase Ketepatan Waktu Evaluasi Dokumen APBD/ APBDP Kabupaten/Kota dan Pertanggungjawaban APBD/APBDP Kabupaten/Kota	%		103.582.028		63.892.000			1				
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Rencana Anggaran Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	108.390.241	100	2.293.851.400	100	2.974.325.300	1	1.305.866.184	1,00	43,90	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	111.695.293	1	102.349.000	1	63.892.000	1	-	100,00	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	121.488.403	1	74.391.000	1	96.290.600	1	26.660.600	100,00	27,69	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	136	67.571.827	136	138.635.500	136	24.018.500	136	-	100,00	-	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	136	37.084.236	136	42.592.400	136	30.097.400	136	-	100,00	-	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	136	1.084.814.840	136	18.679.800	136	7.364.800	268	7.364.800	197,06	100,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	136	346.406.048	136	69.702.800	136	4.567.800	136	-	100,00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	103.855.815	2	557.556.900	2	442.183.700	2	52.500.000	100,00	11,87	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	331.115.036	2	401.770.400	2	519.050.300	2	358.055.520	100,00	68,98	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	1	1.181.608.107	1	743.623.600	1	1.694.369.400	1	861.285.264	100,00	50,83	
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	37	129.954.691	37	144.550.000	37	92.490.800,00	4	-	10,81	-	
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketepatan Waktu tindak lanjut Dokumen Hasil Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten /Kota Sesuai Ketentuan	%	100	221.651.109	100	855.128.200	100	855.128.300,00	31	336.055.760	31,00	39,30	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	Dokumen	10	223.956.257	10	155.366.300	10	155.366.400,00	10	72.416.400	100,00	46,61	
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	laporan	1	68.642.264	1		1						
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda/Perkada tentang Perubahan APBD Kab/Kota	Dokumen	10	216.298.222	10	154.416.500	10	154.416.500,00	10	-	100,00	-	
		Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	laporan	1	321.105.564	1		1						
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Dokumen	10	1.082.652.109	10	157.596.500	10	157.596.500,00	10	68.726.500	100,00	43,61	
		Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	laporan	1	758.813.698	1		1						

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Dokumen	10	636.639	10	86.417.000	10	86.417.000,00	10	80.417.000	100,00	93,06	
	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	laporan	1	15.810.269	1	121.400.200	1	121.400.200,00	1	5.728.560	100,00	4,72	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen	2	5.032.801	2	179.931.700	2	179.931.700,00	1	108.767.300	50,00	60,45	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Provinsi NTB Sesuai Ketentuan	%	100	892.646	100	1.003.948.100	100	1.503.948.100,00	17	314.744.558	17,00	20,93	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	136	9.195.035	136	160.572.300	136	160.572.300,00	1	45.530.200	0,74	28,35	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	laporan	17	31.995.392	17	77.954.100	17	77.954.100,00	17	2.806.800	100,00	3,60	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	217.372.721	1	430.060.400	1	764.474.400,00	1	266.407.558	100,00	34,85	
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	laporan	136	25.276.586	136		136						
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	2	17.626.323	2	178.503.000	2	344.089.000,00	2	-	100,00	-	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	2.688.788.091,44	1	47.907.500	1	47.907.500,00	1	-	100,00	-	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	338.652.174,39	1	50.412.100	1	50.412.100,00	1	-	100,00	-	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	30	160.608.873,47	30	58.538.700	30	58.538.700,00	20	-	66,67	-	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Tingkat Ketepatan Waku Penyusunan Dokumen Laporan Dana Bagi Hasil dan Bantuan tidak terduga	%	100	59.956.019,56	100	1.119.371.624,734	100	1.131.680.157.534,00	1	337.855.122.960	1,00	29,85	
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	laporan	1	228.996.840,91	1	55.321.837.234	1	55.321.837.234,00	1	-	100,00	-	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	laporan	1	229.426.315,48	1	2.358.087.500	1	19.358.108.300,00		-	-	-	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	laporan	1	74.315.643,52	1	54.360.000.000	1	49.668.512.000,00		219.740.173		0,44	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	laporan	1	43.174.143,94	1	1.007.331.700.000	1	1.007.331.700.000,00		337.635.382.787	-	33,52	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Berita Acara hasil rekonsiliasi Barang Milik daerah SKPD	Dokumen	136	113.375.719,60	136	54.321.600	136	54.620.100,00	132	28.809.000	97,06	52,74	
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	laporan	0	85.923.917,81	0		0						
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	laporan	1	24.567.755,46	1		1						
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	laporan	1		1	43.282.700	1	43.282.700,00	1	-	100,00	-	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	136		136	56.089.800	136	56.089.800,00	10	3.898.026	7,35	6,95	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase PD yang Meningkatkan Nilai Implementasi SAKIP-nya	%	100	3.807.331.659	100	1.275.395.500	100	1.436.114.900		792.961.100		55,22	INSPEKTORAT
		Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	%	48,89		48,89		48,89						
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Perangkat Daerah	%	90	2.399.067.769	90		90						
Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase perangkat daerah yang bebas temuan keuangan materiil	Persen	100	1.500.347.625	100	1.144.339.500	100	1.305.058.900		758.841.100		58,15	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	laporan	62		62	40.678.000	62	40.678.000		-		-	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan	39	157.566.277	39	830.303.000	39	831.022.400		608.612.600		73,24	
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	laporan	8	202.077.047	8	50.471.000	8	50.471.000		19.185.000		38,01	
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	laporan	16	432.386.126	16	85.619.500	16	85.619.500		22.808.500		26,64	
	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	laporan	23		23	870	23	870.000		-		-	
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakat an	1		1	20.870.000	1	150.870.000		49.490.000		32,80	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	5		5	115.528.000	5	145.528.000		58.745.000		40,37	
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan	laporan	25		25	131.056.000	25	131.056.000		34.120.000		26,03	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	laporan	4	225.468.766	4	45.528.000	4	45.528.000		14.160.000		31,10	
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	laporan	21	22.185.177.455	21	85.528.000	21	85.528.000		19.960.000		23,34	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	%	26,66	225.468.766	26,66	419.400.000	26,66	509.400.000		296.248.930		58,16	INSPEKTORAT
		Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	%	7,55	225.468.766	7,55		7,55						
		Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%	97	225.468.766	97		97						
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					22.185.177.455		30.585.000		30.585.000		28.980.000		94,75	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomenda si	13	5.541.790.927	13	30.585.000	13	30.585.000		28.980.000		94,75	
Pendampingan dan Asistensi		Jumlah laporan pendampingan dan asistensi	Dokumen	4		4	388.815.000	4	478.815.000		267.268.930		55,82	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	46		46	250.585.000	46	250.585.000		124.351.810		49,62	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	2	5.541.790.927	2	10.835.000	2	10.835.000		-		-	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	11		11	116.810.000	11	206.810.000		142.917.120		69,11	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	2		2	10.585.000	2	10.585.000		-		-	
												217,52	27,50	
Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	43,18		38,65	1.130.460.974.532	124,50		48,12		124,50		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Derajat Desentralisasi Fiskal	%	38,44	1.667.730.000	38,44	184.560.000	38,44	184.560.000		21.176.520		11,47	Bappenda
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Pertumbuhan Pendapatan Daerah	%	4,79		4,79	121.105.000	4,79	121.105.000		13.736.520		11,34	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Rencana Target Pendapatan Daerah	Dokumen	2		2	121.105.000	2	121.105.000		13.736.520		11,34	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	%	60,54		60,54	63.455.000	60,54	63.455.000		7.440.000		11,72	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan	Milyar	3636		3636	63.455.000	3636	63.455.000		7.440.000		11,72	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (di luar DAK)	%	54,03	46.183.810.000	54,03	2.084.050.000	54,03	6.828.917.600	50,19	2.946.266.316	92,89	43,14	Bappenda
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%	9,59		9,59	2.084.050.000	9,59	6.828.917.600	35,97	2.946.266.316	375,08	43,14	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Target pendapatan pajak daerah yang ditetapkan	Milyar Rp	5		5	382.000.000	2032,21	330.300.000	333,09	112.325.040	16,39	34,01	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Perjanjian Kerjasama (PKS) pengembangan layanan kesamsatan yang ditindaklanjuti	MoU	2		2	182.010.000	5	182.010.000	1	47.611.672	20,00	26,16	
		Rancangan Regulasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya	Draft					10		3		30,00		
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Perorangan dan badan	Persen	10		10	126.565.000	66,86	266.565.000	11,45	72.562.800	17,13		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tingkat gangguan perangkat keras dan sistem jaringan komunikasi yang direduksi	Persen	26		26	520.405.000	98,9	797.579.500	97,55	219.303.494	98,63	27,50	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data Obyek Pajak Daerah (DU & TMDU PKB, Wapu PBBKB, dan PAP) yang menyelesaikan kewajiban pajaknya	Obyek	3		3	400.200.000	1126416	529.800.000	210374	273.264.840	18,68	51,58	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah record data yang disinkronkan dalam database	Obyek	3		3	89.975.000	1800000	172.675.000	236840	97.200.000	13,16	56,29	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor	Obyek	1		1	1.325.000	98141	1.803.525.000	26466	743.770.000	26,97	41,24	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Angka partisipasi Wajib Pajak yang menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan bermotornya	Persen	12		12	86.475.000	31,2	188.982.000	18,68	164.051.170	59,87	86,81	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah WP Penunggak Pajak yang menyelesaikan kewajiban pajaknya	Obyek	12		12	21.250.000	351481	21.250.000	34640	7.140.000	9,86	33,60	
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah WP penerima Surat Teguran PKB dan Penagihan Pajak Daerah yang melunasi tunggakan PKBnya	Obyek	2		2	22.610.000	40200	549.876.100	11099	194.722.500	27,61		
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah kasus keberatan pajak daerah yang ditindak lanjuti	Kasus	1		1	1.555.000	3	1.555.000	0	-	-		
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	WP Terjaring Operasi Sadar PKB yang menyelesaikan kewajiban/ tunggakan PKBnya	Obyek	8		8	67.500.000	27409	1.782.620.000	4611	937.264.800	16,82	52,58	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah penerimaan Dana Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, dan penerimaan Pendapatan Lain-lain	Milyar Rp	2		2	182.180.000	917,76	202.180.000	143,84	77.050.000	15,67		
												52,42	34,60	
Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP	Kategori	BB		A (80,01 - 90,00)	11.514.506.543	0,00		0,00		0,00		
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	%	100	14.444.339.884	100	2.113.051.100	100	2.001.080.900		984.060.858		49,18	Bappeda
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen perencanaan & pendanaan pembangunan daerah	Dokumen	10		10	1.402.141.000	10	1.363.670.800		738.131.029		54,13	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	3		3	56.375.000	3	31.375.000		9.455.000		30,14	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	2		2	186.890.000	2	139.900.000		23.900.000		17,08	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1		1	13.950.000	1	67.600.000		64.200.000		94,97	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1		1	129.800.000	1	129.800.000		61.400.000		47,30	
	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	1		1	829.908.000	1	829.908.000		563.779.349		67,93	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2		2	185.218.000	2	165.087.800		15.396.680		9,33	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Analisis Hasil Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	5		5	508.210.000	5	478.210.000		235.416.587		49,23	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	3		3	150.220.000	3	130.220.000		45.760.000		35,14	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	50		50	187.740.000	50	182.740.000		136.529.477		74,71	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang	400		400	170.250.000	400	165.250.000		53.127.110		32,15	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	19		19	202.700.100	19	159.200.100		10.513.242		6,60	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	laporan	2		2	43.200.000	2	20.700.000		-		-	
	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja sama	1		1	14.850.000	1	14.850.000		-		-	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	laporan	14		14	113.950.100	14	107.950.100		7.913.242		7,33	
	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	2		2	30.700.000	2	15.700.000		2.600.000		16,56	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100	37.833.084.161	100	8.136.508.700	100	8.322.955.300		2.908.653.912		34,95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	3		3	1.475.405.700	3	1.583.202.300		496.186.958		31,34	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2		2	20.838.100	2	21.471.400		4.000.000		18,63	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	12		12	10.000.000	12	10.000.000		2.500.000		25,00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	12		12	15.000.000	12	85.000.000		9.910.000		11,66	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1		1	14.290.000	1	14.800.000		-		-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4		4	167.518.800	4	168.036.900		4.500.000		2,68	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	13		13	35.700.000	13	35.700.000		6.250.000		17,51	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	13		13	54.000.000	13	85.000.000		9.686.958		11,40	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	2		2	1.158.058.800	2	1.163.194.000		459.340.000		39,49	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen	3		3	5.947.385.000	3	5.991.535.000		2.238.636.297		37,36	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5		5	73.565.000	5	43.565.000		4.580.000		10,51	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	11		11	42.520.000	11	42.520.000		-		-	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendpatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	11		11	188.872.700	11	292.172.700		108.780.065		37,23	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	3		3	937.362.100	3	1.188.651.100		150.246.900		12,64	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2		2	31.750.000	2	23.750.000		3.500.000		14,74	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	6		6	10.000.000	6	10.000.000		7.020.000		70,20	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	6		6	1.849.433.000	6	1.848.508.000		551.058.660		29,81	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	2		2	2.813.882.200	2	2.542.368.200		1.413.450.672		55,60	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			Dokumen	3		3	713.718.000	3	748.218.000		173.830.657		23,23	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKP/DP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP/DP)	Dokumen	4		4	62.650.000	4	27.650.000		6.950.000		25,14	
	Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistansi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	6		6	6.600.000	6	6.600.000		1.500.000		22,73	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	6		6	36.550.000	6	89.050.000		12.144.758		13,64	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	2		2	8.050.000	2	8.050.000		2.450.000		30,43	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKP/DP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP/DP)	Dokumen	2		2	60.700.000	2	25.700.000		4.420.000		17,20	
	Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistansi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	2		2	6.600.000	2	6.600.000		2.700.000		40,91	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	2		2	39.600.000	2	91.600.000		12.410.721		13,55	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1		1	492.968.000	1	492.968.000		131.255.178		26,63	
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN		Persentase PD yang Meningkatkan Nilai Implementasi SAKIP-nya	%	91,11	333.276.875	91,11		91,11						INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WB8M	%	22,22	95.465.459	22,22		22,22						INSPEKTORAT
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkat	%	100	2.486.608.796	100	849.986.300	100	762.986.300		441.946.438	-	57,92	Biro Organisasi
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		dokumen fasilitasi PD, UPTD/UPTB, Cabang Dinas dan Instansi Vertikal, Dokumen fasilitasi Perangkat Daerah dan UPTD/UPTB Kabupaten /Kota, Dokumen Anjab, Evjab dan ABK, Dokumen Jabatan Struktural	Dokumen	100	1.355.820.752	100	283.307.300	100	283.307.300	100	201.609.844	100	71,16	
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi		Jumlah dokumen UPTD/UPTB, Cabang Dinas dan Instansi Vertikal yang terfasilitasi	Dokumen	6	585.175.408	6	119.435.700	6	119.435.700	6	85.232.482	100	71,36	
		Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi sesuai peraturan perundang-undangan	Dokumen	22	282.231.024	22								
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Perangkat Daerah dan UPTD/UPTB Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	Dokumen	3, 43	488.414.320	3, 43	44.435.800	22	44.435.800	22	23.280.400	100	52,39	
Penataan Analisis Jabatan		Jumlah dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, dan Analisis Beban Kerja yang tersusun	Dokumen	100	2.486.608.796	100	119.435.800	3,43	119.435.800	3,43	93.096.962	100	77,95	
		Jumlah dokumen jabatan struktural yang tersusun	Dokumen	22	642.679.825									
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SAKIP sesuai Peraturan Perundang-Undangan	%	43, 43	614.220.839	43, 43	566.679.000							

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)				
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu		
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dan difasilitasi Pelaksanaan PMPRB	kab/Kota	1	267.573.765	1	69.435.800								
		Jumlah Perangkat Daerah yang dibina Pelaksanaan PMPRB	OPD	43	243.208.989	43									
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen hasil penilaian kinerja perangkat daerah	Dokumen	48	718.925.378	48	173.485.800								
		Jumlah laporan SAKIP Perangkat Daerah yang baik	Laporan												
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan fasilitasi dan evaluasi perangkat daerah/unit kerja penerapan budaya kerja	Laporan				40.385.800		40.385.800		12.786.900				
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki SOP tata kelola pemerintahan	OPD				104.435.800		104.435.800		85.993.047				
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah inovasi pelayanan publik yang termanfaatkan	Inovasi				178.935.800		91.935.800		57.962.500				
		Jumlah unit kerja pelayanan publik yang terbina sesuai standar pelayanan	OPD												
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%	100	9.485.035.504	100	563.997.200	100	563.997.200	100	366.704.347	100	65,02	Biro Pemerintahan	
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		Cakupan pelaksanaan tugas pemerintahan	%	100	2.778.249.878	100	135.745.700	100	135.745.700	3	78.058.008	3,00	57,50		
	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100	794.553.356	100	10.000.200	100	10.000.200	0	7.360.000	-	73,60		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	0	720.804.546	0		0							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	1	1.262.891.976	1		1							
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	1	4.928.610.306	1	50.745.500	1	50.745.500	0	29.184.198	-	57,51		
	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	1	1.933.929.071	1	75.000.000	1	75.000.000	0	41.513.810	-	55,35		
Pelaksanaan Otonomi Daerah		Cakupan pelaksanaan otonomi daerah	%	100	652.721.357	100	305.486.500	100	305.486.500	1	218.916.660	1,00	71,66		
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	1	2.341.959.878	1	80.121.000	1	80.121.000	0	49.285.960	-	61,51		
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1.778.175.320	1	50.340.000	1	50.340.000	0	25.362.600	-	50,38		
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	2	763.762.649	2	175.025.500	2	175.025.500	1	144.268.100	50,00	82,43		
Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Persentase kerjasama daerah yang diselesaikan sampai penandatanganan dokumen kerjasama	%	100		100	122.765.000	100	122.765.000	0	69.729.679	-			
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	10		10	65.000.000	10	65.000.000	6	43.530.679	60,00			
	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen	10		10	32.000.000	10	32.000.000	3	15.200.000	30,00			
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan	15		15	25.765.000	15	25.765.000	4	10.999.000	26,67			
Sasaran 4: Meningkatnya Profesionalisme ASN		Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,64		0,72	5.715.433.455	0,00		0,00		43,38	36,81		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan	Nilai	134	7.425.595.246	134	1.271.225.000	134	1.402.025.000		680.527.812		48,54	BKD	
		Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi	Nilai	115	2.947.141.919,00	115		115							
		Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan	Nilai	80	1.904.365.497,00	80		80							
		Nilai Aspek Sistem Informasi	Nilai	19	264.809.478,00	19		19							
		Nilai Penerapan Sistem Merit	Point	373	-	373		373							
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Sistem Informasi	Point	102	777.966.944,00	102	495.855.000	102	495.855.000,00		225.813.583		45,54		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CPNS/P3K terseleksi	Orang	400	3.492.141.693,00	400	283.105.000	400	283.105.000,00		166.151.000		58,69	
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	0	365.757.991,00	0		0						
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	0	1.037.953.669,00	0	31.080.000	0	31.080.000,00		14.550.000		46,81	
		Jumlah keputusan pemberhentian PNS dan PTT	SK	245	2.088.430.033,00	245		245						
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	jumlah kegiatan fasilitasi KORPRI	Kegiatan	4	479.038.537,00	4	62.550.000	4	62.550.000,00		23.892.583		38,20	
		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	0		0		0						
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah data ASN yang tersedia didalam SIMPEG/SIMADU	Pegawai	14143	16.465.825,00	14143	119.120.000	14143	119.120.000,00		21.220.000		17,81	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	0	92.884.590,00	0		0						
Mutasi dan Promosi ASN		Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	Point	32,5	47.781.226,00	32,5	446.070.000	32,5	446.070.000,00		259.407.000		58,15	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen	0	200.189.778,00	0	69.110.000	0	69.110.000,00		35.962.000		52,04	
		jumlah keputusan perpindahan PNS/PTT	SK	230	121.717.118,00	230		230						
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	jumlah keputusan kenaikan pangkat/gaji berkala	SK	3000	507.273.097,00	3000	108.500.000	3000	108.500.000,00		29.698.000		27,37	
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	0		0		0						
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	0	166.530.163,00	0	268.460.000	0	268.460.000,00		193.747.000		72,17	
		jumlah keputusan penempatan dan pembebasan dalam jabatan struktural	SK	400	97.070.376,00	400		400						
Pengembangan Kompetensi ASN		Nilai Aspek Pengembangan karir, Perlindungan dan pelayanan	Point	373	243.672.558,00	373	142.460.000	373	273.260.000,00		142.484.729		52,14	
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	0		0	34.800.000	0	130.800.000,00		82.654.729		63,19	
		jumlah SPT, Surat rekomendasi, surat ijin mengikuti diklat dan sertifikasi	Pegawai	100		100		100						
	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	0		0	27.900.000	0	34.800.000,00		10.550.000		30,32	
		jumlah pegawai yang mengikuti diklat jafung dan uji kompetensi	Orang	20		20		20						
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Orang	0		0	79.760.000	0	27.900.000,00		10.750.000		38,53	
		jumlah keputusan pengangkatan penyesuaian dan pembebasan/pemberhentian dalam jabatan fungsional	SK	440		440		440						
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Nilai Aspek manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Point	120		120	186.840.000	120	79.760.000,00		38.530.000		48,31	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	0		0	91.500.000	0	186.840.000,00		52.822.500		28,27	
		jumlah PNS yang berkinerja baik	Pegawai	12893		12893		12893						
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	0		0	28.590.000	0	91.500.000,00		24.875.000		27,19	
		jumlah pns yang diberikan penghargaan pegawai teladan	Orang	24		24		24						
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	0		0	66.750.000	0	28.590.000,00		7.275.000		25,45	
		jumlah pembinaan disiplin ASN	OPD	46		46		46						
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%	0,04	51.655.240.040	0,04	4.319.157.300	0,04	4.319.157.300	0	606.652.702	-	14,05	Badan Pengembangan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%	0,13		0,13		0,13		0		-		Sumber Daya Manusia
		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%	0,15		0,15		0,15		0		-		
		Persentase Hasil Evaluasi, Pelaporan dan Kerjasama Penguatan Kapasitas SDM Melalui Pengembangan Kompetensi ASN	%	100		100		100		0		-		
		Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%	1	3.017.260.627	1		1		0		-		
		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	0		0		0		0		-		
Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase Kelulusan & Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan, Standarisasi Kompetensi, Kerjasama dan Evaluasi Pasca Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis	%	100	248.451.557	100	449.847.200	100	449.847.200	50	135.418.124	50,00	30,10	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	0	188.076.443	0	91.566.800	1	91.566.800	1	29.026.544	100,00	31,70	
		Tingkat Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis Yang Dilaksanakan Sesuai dengan Dokumen Perencanaan	%	100	2.178.461.048	100		100				-		
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	0	402.271.578	0	31.994.300	1	31.994.300	1	14.335.900	100,00	44,81	
		Persentase dokumen pengelolaan lembaga sertifikasi penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi yang disusun tepat waktu	%	100 %	48.637.979.414	100 %		100				-		
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	0 Orang		0 Orang	301.286.100	170	301.286.100	50	82.191.900	29,41	27,28	
		Persentase ASN yang lulus dan bersertifikat pengembangan kompetensi teknis	%	100		100								
	Pembinaan, Pendoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pendoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	Dokumen	0	132.057.743	0	25.000.000	1	25.000.000	1	9.863.780	100,00	39,46	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
						Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	Kinerja (%)	Keuangan (%)	
		Persentase tercapainya pembinaan dan pengendalian pengembangan kompetensi teknis & Persentase hasil evaluasi pasca pengembangan kompetensi teknis yang tervalidasi dan ditindaklanjuti	%	100	392.098.238	100		100		0		-		
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Kelulusan Uji Sertifikasi Kompetensi JFT & Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan, Standarisasi Kompetensi, Kerjasama dan Evaluasi Pasca Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	%	100	671.037.778	100	3.869.310.100	100	3.869.310.100	0	471.234.578	-	12,18	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial ,fungsional dan latsar PNS sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah tersusun	%	100	1.542.322.946	100	25.000.000	1	25.000.000	1	-	100,00	-	
	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	Dokumen	2,00	164.865.900	2,00	59.170.400	2,00	59.170.400	0	12.887.200	-	21,78	
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Orang	0	188.076.443	0	131.916.100	60	131.916.100	0	54.575.920	-	41,37	
		Persentase ASN jabatan fungsional tertentu lingkup Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang tersertifikasi	%	100,00	45.427.613.780	100,00		100,00				-		
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan	-	119.906.585	-	458.919.500	3,00	458.919.500	0	255.361.502	-	55,64	
		Persentase dokumen kelembagaan Pengelolaan yang disusun tepat waktu, tenaga pengembang Tenaga Pengembang Kompetensi (TPK) yang terkirim, widyaiswara yang memenuhi standar kompetensi	%	100,00		100,00		100,00						
	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Dokumen	-		-	81.400.000	10,00	81.400.000		31.794.596		39,06	
		Persentase tercapainya kesepakatan bersama (KB) antara Gubernur NTB dengan Bupati/Walikota se NTB dan Perjanjian Kerjasama (PKS) Antar Lembaga melalui BPSDMD Provinsi NTB dengan BKPSDM Kabupaten/Kota Se NTB dalam rangka penguatan kapasitas SDM melalui Pengembangan Kompetensi ASN yang bersertifikat	%	100,00		100,00		100,00						

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
						Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	Kinerja (%)	Keuangan (%)	
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Persentase capaian penyusunan modul kegiatan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional, pimpinan daerah dan latsar CPNS, Persentase tersusunnya buku pedoman dan SOP kegiatan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional, pimpinan daerah, dan latsar CPNS dan Persentase penentuan metode pembelajaran kegiatan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional, Pimpinan daerah dan latsar CPNS (classical, BL dan DL)	%	100,00		100,00	25.000.000	100,00	25.000.000		-		-	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Orang	-		-	2.987.904.100	145,00	2.987.904.100	0	77.618.380		2,60	
		Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	%	100,00		100,00		100,00						
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan & Persentase hasil evaluasi pasca pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang tervalidasi dan ditindaklanjuti	%	100,00		100,00	100.000.000	100,00	100.000.000		38.996.980		39,00	
												23,97	37,45	
Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Indeks Pelayanan Publik	Point	3,71		4,55	12.577.307.987	0,00		0,00		0,00		
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk	%	98,90		98,90	120.107.000	98,90	120.107.000	96,37	57.505.700	97,44	47,88	DPMDes Dukcapil
Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		Persentase penyelenggaraan pendaftaran kependudukan	%	100	110.660.111	100	120.107.000	100	120.107.000	11,62	57.505.700	11,62	47,88	
	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk	Kali	33	82.164.000	33	88.827.000	33	88.827.000	0	29.700.000			
	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Berat Dokumen/barang yang dikirim	Kg	500	28.496.111	782	31.280.000	782	31.280.000	532,6	27.805.700	68,11	88,89	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%	100	85.820.600	100	92.827.000	100	92.827.000	97,67	21.120.380	97,67	22,75	DPMDes Dukcapil
Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Jenis Dokumen Catatan Sipil dan pendukungnya	Dokumen	1	85.820.600	1	92.827.000	10	92.827.000	10	21.120.380	100,00	22,75	
	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	jumlah peserta Rakor di bidang pencatatan sipil	Orang	40	85.820.600	40	92.827.000	17	92.827.000	17	21.120.380	100,00	22,75	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase pengelolaan informasi data administrasi kependudukan yang baik di tingkat kab/kota	%	100	182.010.364	100	157.585.000	100	157.585.000	9,46	14.900.380	9,46	9,46	DPMDes Dukcapil

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	kali	10	182.010.364	10	81.758.000	4	81.758.000	0	-	-	-	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Berat Dokumen/Barang yang dikirim	Kg	1	12.562.083	1	78.000.000	782	78.000.000	0	-	-	-	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah jenis Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jenis	1	169.448.281	1	3.758.000	3	3.758.000	0	-	-	-	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	%	10		10	75.827.000	100	75.827.000	19,650	14.900.380	19,65		
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Frekuensi perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tahun	1	195.198.365	1	75.827.000	1	75.827.000	0,197	14.900.380	19,65	19,65	
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkaran hutan dan pesisir	%	25	119.143.303	25	200.000.000	20	200.000.000	11,5	47.732.060	57,50	23,87	DPMDes Dukcapil
Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		Jumlah Fasilitasi Kerjasama antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi	Kali	435	119.143.303	435	200.000.000	3	200.000.000	1	47.732.060	33,33	23,87	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	FGD Pengembangan Kerjasama Potensi Unggulan Desa	Kabupaten	1	31.689.519	1	55.000.000	4	55.000.000	0	-	-	-	
	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	BIMTEK Kerjasama Desa Provinsi NTB	Orang	1	31.689.519	1	45.000.000	56	45.000.000	0	16.912.060	-	37,58	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	FGD Pengembangan Kawasan Perdesaan	Kabupaten	1	55.764.265	1	100.000.000	4	100.000.000	0	30.820.000	-	30,82	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	%	80	16.947.033.421	80	6.554.447.140	80	7.441.141.440		4.195.261.579		56,38	Diskominfotik
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik	%	85	6.702.957.548	85	6.554.447.140	85	7.441.141.440		4.195.261.579		56,38	
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	2	361.052.338	2	246.944.300	2	246.937.300		78.169.084		31,66	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	0	1.587.444.652	0	1.513.100.000	0	2.888.593.000		803.450.495		27,81	
		Jumlah informasi yang diproduksi dan disebar melalui media publik (Informasi)	Informasi	806	114.738.050	806		806						
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	0	36.081.131	0	83.057.000	0	158.067.000		43.656.000			
		Jumlah informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Perangkat Daerah (Informasi)	Informasi	690	109.720.279	690		690						
	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	0	1.551.207.649	0	12.000.000	0	12.000.000		6.500.000		54,17	
		Jumlah Lembaga dan Pers yang terlibat dalam penyebarluasan informasi (Lembaga/Pers)	Lembaga/Pers	5	2.509.787.788	5		5						
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Aparatur yang terlatih dan terfasilitasi (Aparatur/Orang)	Aparatur/Orang	40	432.925.661	40	57	40						
		Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	0		0		0						
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen	0		0	1.229.231.840	0	1.267.930.140		763.486.000		60,22	
		Jumlah Sengketa Informasi yang terselesaikan (Kasus)	Kasus	2		2		2						

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	0		0	3.470.000.000	0	2.780.114.000		2.500.000.000		89,92	
		jumlah Kelompok / Komunitas yang diberdayakan dalam penyebarluasan informasi (Komunitas)	Komunitas	15		15		15						
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Unit	0		0	57	0	87.500.000		-			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik (Unit)	Unit	10		10		10						
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase Layanan Berbasis TIK (%)	%	65	6.229.379.686	65	3.021.449.700	65	2.400.359.800		492.416.173		20,51	Diskominfotik
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					2.463.868.840		3.021.449.700		2.400.359.800		492.416.173	100,00	20,51	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen	2	634.750.115	2	130.720.000	2	155.720.000		55.828.526		35,85	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data (OPD)	OPD	46	1.185.635.464	46	2.181.129.700	46	2.050.039.800		382.587.647		18,66	
		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	0	539.633.718	0		0						
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	0	103.849.543	0	644.600.000	0	129.600.000		54.000.000		41,67	
		Jumlah simpul jaringan Perangkat Daerah yang terkoneksi (OPD)	OPD	30		30		30						
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	0		0	65.000.000	0	65.000.000		-			
		Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan (aplikasi)	Aplikasi	3		3		3						
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%	30	1.530.744.809	30	200.000.000	30	200.000.000	46	63.860.420	153,33	31,93	Diskominfotik
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		Persentase Data yang Tervalidasi (%)	%	65	605.446.229	65	200.000.000	65	200.000.000	46	63.860.420	70,77	31,93	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Jenis Data Yang Tersedia (jenis)	Jenis	550	54.019.082	550	40.214.800	550	40.214.800		12.943.950		32,19	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Statistik yang meningkatkan pemahaman (aparatur/orang)	Aparatur/O rang	55	377.189.970	55	28.535.800	55	28.535.800		8.716.470		30,55	
		Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	0	26.548.709	0		0						
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	0	31.506.296	0	31.893.600	0	31.893.600		8.300.000		26,02	
		Jumlah Metadata yang terbangun (jenis)	Jenis	20	116.182.172	20		20						
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	0		0	28.358.600	0	28.358.600		-			
		Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah (OPD)	OPD	46		46		46						
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	0		0	70.997.200	0	70.997.200		33.900.000		47,75	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)				
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu						
		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi statistik (OPD)	OPD	7		7		7							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)	%	50	1.492.430.577	50	177.001.000	50	177.001.000		24.705.000		13,96	Diskominfotik	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	%	50	387.276.530	50	87.421.000	50	87.421.000	86	2.735.000	172,00	3,13		
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Koordinasi Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi	Dokumen	1	47.577.621	1	56.000.000	1	56.000.000		-		-		
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	0	219.127.137	0		0							
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	0	93.443.123	0	8.618.600	0	8.618.600		2.735.000		31,73		
		Jumlah SDM Pengelola Keamanan Siber	Orang	5	27.128.649	5		5							
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	laporan	0	105.862.015	0	2.302.400	0	2.302.400		-		-		
		Jumlah Pengamanan Informasi Perangkat Daerah (insiden)	Insiden	14	105.862.015	14		14							
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Perangkat Daerah	OPD	46		46	20.500.000	46	20.500.000		-		-		
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Dareah	0		0		0							
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi							89.580.000	100	89.580.000	15	21.970.000	15,00	24,53		
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Komunikasi Sandi	OPD	46		46	89.580.000	46	89.580.000		21.970.000		24,53		
		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	OPD	0		0		0							
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	0,9	90	300.351.716	90	70.975.200	90	70.975.200	100	19.437.200	111,11	27,39	Dsinakertrans	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokjumen Rencana Tenaga Kerja yang di hasilkan	dokumen	2	300.351.716	2	70.975.200	2	70.975.200	1	19.437.200	50,00	27,39		
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	244.705.400	1	70.975.200	1	70.975.200	1	19.437.200	100,00	27,39		
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	100	1.293.706.035	100	1.085.528.411	100	960.770.211		144.036.671		14,99	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perpustakaan 10 Kab/Kota	Orang	200	1.102.657.588	200	918.516.711	200	795.640.711		91.728.871		11,53		
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah kunjungan pemustaka	Perpustaka an	35.000	169.517.257	35.000	125.000.011	35.000	145.000.011	21378	39.155.871	61,08	27,00		
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang dibina	Perpustaka an	10	751.639.358	10	200.000.000	10	40.000.000	7	-	70,00	-		
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustaka an	100	89.274.888	100	200.000.000	100	200.000.000		-		-		
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Orang	150		150	182.907.900	150	166.825.300		-				

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	4.000		4.000	210.608.800	4.000	243.815.400		52.573.000		21,56	
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		Terlaksananya sosialisasi budaya baca	orang	1.000		1.000	167.011.700	1.000	165.129.500		52.307.800		31,68	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Perpustakaan	24	-	24	167.011.700	24	165129500		52.307.800		31,68	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah	%	100	237.167.713	100	79.391.200	100	53118200		19.857.500		37,38	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi		Tersedianya koleksi deposit	Judul	550	64.936.077	550	11.507.600	550	10.163.600		4.131.500		40,65	
	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Eksemplar	300	64.936.077	300	11.507.600	300	10.163.600	115	4.131.500	38,33	40,65	
Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah		Tersedianya Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Eksemplar	800	-	800	32.242.700	800	22763700		8.815.500		38,73	
	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	Entry	1000	85.225.042	1000	17.792.700	1000	13.048.700		6.200.500		47,52	
	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	Entry	300	48.192.201	300	14.450.000	300	9.715.000		2.615.000		26,92	
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi		Tersedianya naskah kuno daerah	Naskah	10	37.032.840	10	35.640.900	10	20.190.900		6.910.500		34,23	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	Naskah	3	87.006.593	3	21.861.000	3	8.061.000	3	4.468.000	100,00	55,43	
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Naskah	3	38.929.620	3	13.779.900	3	12.129.900	3	2.442.500	100,00	20,14	
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII (orang)	orang	43.000	-	43.000	731.641.700	43.000	731.641.700		639.047.841		87,34	Badan Penghubung Daerah
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		Jumlah event Promosi yang dilaksanakan	Kali	8		8	731.641.700	8	731.641.700		639.047.841		87,34	
	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Laporan	8		8	210.000.000	8	210.000.000		210.000.000		100,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Laporan	1		1	521.641.700	1	521.641.700		429.047.841		82,25	
												58,54	32,76	
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah														
Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing		Indeks Kesehatan	Point											
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat		Angka Harapan Hidup	Tahun	67,07		67,48	-	0,00		0,00		0,00		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	Persen	85	490.192.636.948	85	127.652.856.921	85	109.778.210.596		45.948.776.661		41,86	Dinas Kesehatan
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	Persen	100		100		100						
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Persen	97		97		97						
		Persentase balita Wasting	Persen	11,41		11,41		11,41						
		Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	Persen	11,41		11,41		11,41						
		Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80 %	Persen	90		90		90						

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)				
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu		
		Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	Persen	30		30		30							
		Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	Persen	100	3.651.104.864	100		100							
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	Persen	100	-	100		100							
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	Persen	100	-	100		100							
		Persentase Puskesmas Yang di Bina Mampu melaksanakan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Keluarga (KIA PKPR PKRET Lansia) sesuai Standar	Persen	87	-	87		87							
		Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	Persen	75	-	75		75							
		Persentase Peserta JKN Dapat Mengakses Pelayanan Kesehatan	Persen	100	4.187.371.186	100		100							
		Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	Persen	75	3.600.000.000	75		75							
		Persentase Penyelesaian Data dan Informasi Kesehatan Daerah	Persen	100	95.840.033	100		100							
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Jenis Obat Yang Diadakan dan Distribusikan	Jenis	20	491.531.153	20	13.260.183.753	20	13260213608		827.667.390			6,24	
		Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan yang disediakan	Paket	4	75.626.672.761	4	9.358.795.880	4	463294000		207.676.250			44,83	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	258.312.957	1	464.514.000	1	12796919608		619.991.140			4,84	
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Jenis	3	218.638.724	3	12.795.669.753	3	463294000		207.676.250			44,83	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	1	741.853.974	1	4.787.668.432	1	0						
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Unit	1	982.254.586	1	342.000.000	1							
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	30	1.187.775.766	30	324.675.000	30							
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	Paket	300	10.098.612.892	300	1.849.389.848	300							
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	50	612.401.193	50	2.055.062.600	50							
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Kab / Kota yang mendapat pembinaan pendampingan dan Monev / investigasi kegiatan UKP Rujukan UKM dan UKMR ujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota	10	3.956.744.171	10	113.439.203.524	10	95929026344		44.821.017.431			46,72	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	27707	912.043.506	27707	6.584.218.000	27707	6584218000		1.560.377.700		23,70	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4200	46.687.447	4200	1.880.350.000	4200	1799999964		452.968.271		25,16	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	50	242.040.536	50	1.091.000.200	50	1345771392		235.390.000		17,49	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	50	144.117.959	50	111.000.000	50	111000000		-		-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	40	3.501.558.504	40	189.000.000	40	189000000		71.245.000		37,70	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	10	46.614.847.827	10	1.234.505.900	10	979704900		117.019.000		11,94	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	4	248.408.703	4	235.966.000	4	320400000		-		-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	10	107.068.430	10	8.273.275.700	10	8373275700		1.391.776.438		16,62	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	383	373.293.715	383	413.833.000	383	329399000		-		-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	10	64.059.520	10	518.306.600	10	518306600		136.295.000		26,30	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	10	347.319.534	10	50.316.100	10	50316100		5.795.000		11,52	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	171	4.000.000.000	171	260.852.900	171	260852900		32.900.000		12,61	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	Orang	0	98.425.389	0	155.319.500	0	155319500		19.600.000		12,62	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	11	93.716.689	11	3.300.000.000	11	4050000000		100.000.000		2,47	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	10	9.011.763	10	87.306.912.226	10	68960462236		40.441.476.422		58,64	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	10	123.776.022	10	449.650.000	10	449650000		22.500.000		5,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	10	409.886.957	10	101.612.000	10	100000000		-		-	
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	20	370.687.096	10	652.597.846	10	640512500		167.182.000		26,10	
	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Kabupaten/ Kota	10	39.199.861	10	64.059.500	10	64059500		-		-	
	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Dokumen	10	256.153.891	10	80.000.000	10	80000000		-		-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	10	111.439.939	10	72.000.000	10	72000000		60.320.000		83,78	
	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	10	144.713.952	10	54.716.500	10	54716500		-		-	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	20		20	9.712.152	20	90062152		4.150.000		4,61	
	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen	10		10	349.999.400	10	349999400		2.022.600		0,58	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Daerah	Dokumen	1		1	408.571.089	1	387571089		110.449.100		28,50	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	1		1	370.071.089	1	370071089		110.449.100		29,85	
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	Unit	3		3	38.500.000	3	17500000		-		-	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit	Unit	45		45	544.898.555	45	201399555		189.642.740		94,16	
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	45		45	109.126.655	45	109126655		98.652.740		90,40	
		Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	0		0		0						
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	0		0	92.272.900	0	92272900		90.990.000		98,61	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	10		10	343.499.000	10						
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	2,5	3.651.104.864	2,5	583.672.984	2,5	1.033.672.984		460.286.850		44,53	Dinas Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	500		500	89.943.700	500	89.943.700		20.020.800		22,26	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	112		112	29.983.700	112	29.983.700		5.020.800		16,75	
	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	Orang	112		112	59.960.000	112	59.960.000		15.000.000		25,02	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah dokumen rencana pemenuhan Minimal 9 Tenaga Kesehatan di puskesmas Provinsi NTB	Orang	500		500	601.502.284	500	943.729.284		440.266.050		46,65	
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	10		10	454.249.284	10	904.249.284		405.826.050		44,88	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Dokumen	1		1	107.773.000	1						
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Persen	2,5		2,5	39.480.000	2,5	39.480.000		34.440.000			
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat	Persen	95	239.953.724	95	100.229.387	95	100.229.387		-		-	Dinas Kesehatan
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Persen	95		95	90.816.566	95						

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
Penerbitan Pengakuan Pedagog Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		Jumlah Sarana PBF Cabang dan Cabang PAK yang dibina dan diawasi	Sarana	18	90.816.566	18	96.200.887	18	96.200.887		-		-	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	Sarana	18	16.955.958	18	96.200.887	18	96.200.887		-		-	
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)		Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dibina dan diawasi	Sarana	3	16.955.958	3	4.028.500	3	4.028.500		-		-	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	3		3	4.028.500	3	4.028.500		-			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase SPM yang mencapai target	%	85	163.139.610.602	85	13.705.549.701	85						Rumah Sakit Umum Daerah
		Persentase SPM yang mencapai target	%	85		85		85						
		Persentase SPM yang mencapai target	%	90		90		90						
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase kelengkapan Sarana, Prasarana dan alkes (Data ASPAK)	%	90		90	13.498.885.501	90	14747573382	6	10.600.296.817	6,67	71,88	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase kelengkapan alat kesehatan (Data ASPAK)	%	90		90	13.498.885.501	90	14747573382	92	10.600.296.817	102,22	71,88	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100		100	206.664.200	100	219519034		-		-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase ODHA yang mendapatkan pemeriksaan CD4/viral load dan meso ARV	%	90		90	206.664.200	90	219519034		-			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80	29.809.896.151	80	5.200.000.000	80	5199999961	80	2.478.595.409	100,00	47,7	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
		persentase SPM yang mencapai target	persen	76,19	-	76,19		76,19						
		Persentase SPM yang mencapai target	%	76,19	10.267.241.647	76,19		76,19						
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		persentase ketersediaan fasilitas pelayanan sarana, prasarana dan alat kesehatan	persen	93		93	4.464.000.000	93	4463999961	73,42	2.285.982.720	78,95		
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	jumlah unit alat kesehatan	Unit	1		1	1.402.500.000	1	1655802361	2	1.590.500.000	200,00		
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah jenis	jenis	13	1.616.215.772	13	3.061.500.000	13	2808197600	13	695.482.720	100,00	24,77	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		persentase masyarakat yang terlayani	persen	100		100	686.000.000	100	686000000	72,75	192.612.689	72,75		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah orang yang terlayani	Orang	4363		4363	25.000.000	4363	25000000	0	-	-		
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah orang yang terlayani	tahun	1	5.610.281.704	1	25.000.000	1	25000000	0	12.280.000	-	49,12	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang yang terlayani	orang	36020	1.259.522.597	36020	91.300.000	36020	91300000	27966	16.720.400	77,64	18,31	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah orang yang terlayani	Orang	350	161.031.598	350	27.100.000	350	271000000	0	2.000.000	-	7,38	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah orang yang terlayani	orang	80	292.606.158	80	507.600.000	80	507600000	8	161.612.289	10,00	31,84	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah orang yang terlayani	orang	550	114.887.422	550	10.000.000	550	100000000	0	-	-	-	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		persentase elemen akreditasi yang terpenuhi	persen	80	670.243.441	80	50.000.000	80	500000000	-	-	-	-	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	jumlah dokumen elemen akriditasi yang terpenuhi	dokumen	2	20.753.975	2	50.000.000	2	500000000	-	-	-	-	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase SPM yang mencapai target	%	100,00	144.479.341.067	100,00	29.787.645.055	100,00						Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang diadakan	Paket	4		4	29.147.565.055	4	27.886.022.340		4.946.624.465			
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	200	84.197.172.000	200	25.038.265.055	200	23.776.722.340		4.897.085.165	78,00	20,60	
	Pengadaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1	5.013.649.000	1	4.109.300.000	1	4.109.300.000		49.539.300	100,00	1,21	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	100	700.000.000	100	640.080.000	100	640.080.000		209.429.163	40,00	32,72	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	-		-	640.080.000	-	640.080.000		209.429.163			
		Jumlah Masyarakat Miskin, Terlantar dan Masalah Sosial Lainnya yang Tertangani	Dokumen	132	209.410.000	132		132				0,00		
												56,84	24,75	
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat		Persentase Balita Stunting	%							0,00		0,00		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase balita Wasting	%											Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas	Persen	70	5.059.563.209	70	263.576.970	70	263.576.970		59.930.000	-	22,74	Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Saluran Media yang digunakan dalam penyebarluasan informasi Kesehatan	Jenis	7		7	103.576.970	7	103.576.970		-		-	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	7		7	103.576.970	7	103.576.970		-		-	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Puskesmas yang Dibina Germas dan PHBS	Puskemas	40		40	160.000.000	40	160.000.000		59.930.000			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen	40		40	160.000.000	40	160.000.000		59.930.000			
												0,00	7,58	
Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing		Indeks Pendidikan	Point											
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan		Harapan Lama Sekolah	Tahun				23.757.559.575					0,00		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Rata rata Lama Sekolah	Tahun									0,00		
		Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	70,6	1.486.214.496.782	70,6	549.441.870.700	70,6	549.445.575.400		41.918.917.601		7,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)				
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu		
		Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	%	98,02		98,02		98,02							
		Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	100		100		100							
		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	95,28		95,28		95,28							
		Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB	Rasio	0,048611111		0,048611111		0,048611111							
		Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio	0,042361111		0,042361111		0,042361111							
		Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	Rasio	0,047222222		0,047222222		0,047222222							
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Persentase Angka Drop Out (DO) SMA	%	0,24		0,24	274.398.190.634	0,24	277.628.346.000			29.482.155.442		10,62	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	40		40	84.284.675.000	40	13.826.723.000			3.786.580.880		27,39	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	35		35	200.000.000	35	11.230.878.500			1.577.599.000		14,05	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	40		40	573.517.500	40	24.653.455.500			5.401.666.700		21,91	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	13507		13507	3.491.063.100	13507	1.641.493.100			65.623.700		4,00	
	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	5		5	3.685.000.000	5	7.202.543.000			2.834.266.000		39,35	
	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	1		1	411.600.000	1	411.600.000			502.034.100		121,97	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	1200		1200	76.366.000	1200	76.371.000			73.219.183		95,87	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		1177		1177	351.150.300	1177	252.548.600			33.122.800		13,12	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	344		344	176.996.603.334	344	180.412.560.000			-		-	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	100		135	570.613.300	135	501.213.500			182.341.500		36,38	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1		1	1.105.200.000	1	1.281.367.900			337.525.783		26,34	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	10		10	2.024.770.100	10	1.410.498.400			394.285.900		27,95	
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	100		100	627.632.000	100	527.601.000			84.826.096		16,08	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Persentase Angka Drop Out (DO) SMK	%	0,57		0,57	238.066.899.833	0,57	237.140.415.600			10.181.932.299		4,29	
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	65		65	94.611.911.000	65	10.065.145.000			3.989.262.120		39,63	
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	16		16	200.000.000	16	32.900.000.000			3.059.256.250		9,30	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	25		25	595.000.000	25	3.761.722.000			30.771.000		0,82	
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	17		17	593.482.400	17	4.203.874.400			462.920.700		11,01	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2		2	1.000.000.000	2	1.600.000.000			20.514.800		1,28	
	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	8		8	2.185.000.000	8	37.734.697.000			1.263.109.325		3,35	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu				
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	2		2	535.500.000	2	535.500.000		537.660.800	100,40	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	2		2	399.499.900	2	399.499.900		147.267.904	36,86	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	1200		1200	76.437.000	1200	76.437.000		-	-	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	100		100	78.275.000	100	78.275.000		5.000.000	6,39	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	9		9	1.087.253.400	9	1.105.253.400		246.659.000	22,32	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	337		337	133.970.293.333	337	132.592.960.000		-	-	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1		1	325.000.000	1	325.000.000		77.672.156	23,90	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	10		10	1.778.775.300	10	598.998.400		213.225.000	35,60	
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	100		100	630.472.500	100	530.499.400		65.686.700	12,38	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan								175.599.100		62.926.544	35,84	
Pengelolaan Pendidikan Khusus		Persentase Akreditasi SLB minimal B	%	40		40	36.976.780.233	40	34.676.813.800		2.254.829.860	6,50	
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Ruang	1		1	13.295.463.000	1	-		816.574.800		
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2		2	68.500.000	2	68.500.000		25.570.000	37,33	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2		2	968.689.500	2	968.689.500		24.801.500	2,56	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2		2	114.000.000	2	522.128.500		24.031.560	4,60	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	50		50	2.022.550.000	50	1.923.013.000		408.827.500	21,26	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	2		2	100.000.000	2					
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	250		250	59.500.000	250	66.628.000		-	-	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	100		100	70.529.000	100	117.777.000		49.351.000	41,90	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	30		30	18.375.643.333	30	16.337.020.000		-	-	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	450		100	394.104.100	100	337.904.000		20.380.000	6,03	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1		1	170.000.000	1	170.000.000		-	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)				
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu		
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%		831.855.187										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi															
	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi														
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN		Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100	100	100	3.350.050.780	100	3.930.174.800		814.123.700		20,71		Dinas Pemuda dan Olahraga
		Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	100	100		100							
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		TerlaksananyaPelatihanKecakapan Pemuda			160		3.350.050.780		3.930.174.800		814.123.700		20,71		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah pemuda pelopor yang terseleksi untuk tingkat nasional	Orang	1	15	1	125.000.000	1	117.500.000		17.500.000		14,89		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah wirausaha muda yang mengikuti pelatihan	Orang	100	100	100	25.000.000	100	25.000.000		25.000.000		100,0		
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	0	18	0	885.050.780	0	1.070.174.800		58.373.800		5,45		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terpelihara	Unit	1	-	1		1							
	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Lembaga atau Organisasi Kepemudaan yang Difasilitasi	Lembaga	20	100	20	2.215.000.000	20	2.610.000.000		700.000.000		26,8		
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	Orang	25	60	25	100.000.000	25	107.500.000		13.249.900		12,33		
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Presentase Pembinaan Altlet Berprestasi	%	100	100	100	18.409.971.980	100	19.836.950.000		9.221.008.500		46,5		Dinas Pemuda dan Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Presentase Sarana PrasaranaOlahraga yang Terstandar	%	45	40	45	6.094.956.780	45	7.333.160.000		154.859.500		2,1		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Terpelihara	Unit	1	2	1	6.094.956.780	1	7.333.160.000		154.859.500		2,1		
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		Jumlah Medali Yang Diperoleh	Medali	40	40	40	2.322.015.300	40	2.274.704.100		47.131.000		2		
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	event	4	5	4	1.035.000.000	4	1.255.000.000		47.131.000		3,76		
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang	200	150	200	1.287.015.300	200	1.019.704.100		-		-		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		Jumlah cabor yang dibina	cabor	3	3	3	112.999.900	3	399.085.900		19.018.000		4,77	
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Peng	Jumlah Atlit Pelajar yang di Bina	Orang	12	12	12	112.999.900	12	399.085.900		19.018.000		4,77	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah organisasi keolahragaan yang dibina	Lembaga	10	10	10	9.880.000.000	10	9.830.000.000		9.000.000.000		91,6	
	Pengembangan Organisasi Keolahra	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen	0	10	0	9.880.000.000	0	9.830.000.000		9.000.000.000	-	91,6	
		Jumlah Lembaga atau Organisasi Keolahragaan yang Difasilitasi	Lembaga	10		10		10						
												0,00	25,03	
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan														
Tujuan 1: Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point											
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung		Indeks Kualitas Air	Point			1.482.230.711			0,00		0,00			
		Indeks Kualitas Udara	Point						0,00		0,00			
		Indeks Kualitas Air Laut	Point						0,00		0,00			
PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP		persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%	24	1.024.902.302,60	24	149.957.400	24	499.957.400		41.104.784		8,22	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Jumlah Dokumen RPPLH, IKPLHD, dan IKLH yang disusun	dokumen	2	602.571.166,34	2	69.117.400	2	69.117.400		21.219.800		30,70	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	Dokumen	1	445.639.676,49	1	39.248.200	1	39.248.200		11.718.600		29,86	
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Dokumen	1	156.931.489,85	1	29.869.200	1	29.869.200		9.501.200		31,81	
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Jumlah KLHS yang disusun dan divalidasi	dokumen	7	422.331.136,26	7	80.840.000	7	430.840.000		19.884.984		4,62	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	Dokumen	6	218.812.769,16	6	77.540.000	6	77.540.000		-		-	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Dokumen	8	133.665.362,66	8	1.600.000	8	1.600.000		-		-	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Dokumen	1	69.853.004,43	1	1.700.000	1	351.700.000		19.884.984		5,65	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi	10	2.835.284.286	10	126.500.200	10	607.580.750		180.039.830		29,63	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkguan Hidup		Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup	unit usaha	30	2.181.040.532,41	30	97.730.700	30	578.811.250		176.731.830			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1	1.257.588.598,00	1	49.228.700	1	149.228.700		57.643.900		38,63	
		Jumlah titik sampel dilakukan pengawasan pencemaran lingkungan hidup	Lokasi	10		10	100.000.000	10	48.502.000		9.118.000			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	1	2.181.040.532,41	1	48.502.000	1						
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	titik sampel	282		282	474.169.950	282	381.080.550		109.969.930			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah lokasi pencemaran lingkungan yang diatasi	lokasi	3	437.488.380,00	3	28.769.500	3	28.769.500		3.308.000			
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	1	200.000.000,00	1	28.769.500	1	28.769.500		3.308.000		11,50	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	lokasi	1,00	232.926.464	1,00	48.690.300	1,00	48.690.300		11.011.200		22,61	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi		Jumlah lokasi pengelolaan taman kehati	lokasi	1,00	128.583.400,00	1,00	48.690.300	1,00	48.690.300		11.011.200		22,61	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1,00	128.583.400,00	1,00	48.690.300	1,00	48.690.300		11.011.200		22,61	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	unit	210	232.426.464	210	34.430.400	210	34.430.400		20.068.260		58,3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dalam pengelolaan LB3	unit usaha	30	232.426.464,11	30	34.430.400	30	34.430.400		20.068.260		58,29	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	persetujuan /izin	5	232.426.464,11	5	34.430.400	5	34.430.400		20.068.260		58,29	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	usaha/kegiatan	30	605.251.864	30	75.000.000	30	75.000.000		11.230.000		14,97	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah usaha/kegiatan pemegang izin lingkungan yang dibina dan diawasi	usaha/kegiatan	60	605.251.863,75	60	75.000.000	60	75.000.000		11.230.000		14,97	
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Dokumen	1	304.909.970,89	1	37.500.000	1	37.500.000		1.500.000		4,00	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	1	300.341.892,86	1	37.500.000	1	37.500.000		9.730.000		25,95	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan	%	10	632.449.873	10	149.924.600	10	149.924.600		13.760.000		9,18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah sekolah yg mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi	sekolah	10	632.449.873,25	10	149.924.600	10	149.924.600		13.760.000		9,18	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	632.449.873,25	1	149.924.600	1	149.924.600		13.760.000		9,18	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	kelompok											Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	pengaduan	20	641.333.479	20	74.999.900	20	74.999.900		7.910.000		10,55	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu				Realisasi Kinerja	Realisasi Keu
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	pengaduan	20	641.333.478,89	20	74.999.900	20	74.999.900		7.910.000		10,55	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	15	319.536.688,77	15	37.499.900	15	37.499.900		5.810.000	-	15,49	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Dokumen	5	321.796.790,12	5	37.500.000	5	37.500.000		2.100.000		5,60	
												0,00	20,10	
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point				8.351.117.082			0,00		0,00		
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	10	61.710.986.449	10	4.983.222.100	10	6751296500		1.089.830.469		16,14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%	100	-	100		100						
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	km	10,00	1.238.270.457,41	10,00	688.308.500,00	10,00	688.308.500		103.562.600		15,05	
	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	9,00	1.238.270.457,41	9,00	688.308.500,00	9,00	688.308.500		103.562.600		15,05	
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Persentase dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	%	100	925.545.561,16	100	74999800	100	295.054.500		63.332.400		21,46	
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	28	925.545.561,16	5	74.999.800	5	295.054.500		63.332.400		21,46	
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	dokumen	1	4.616.641.548,59	1	805.766.500	1	1.001.128.500		69.309.460		6,92	
	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	548.256.117,70	1	99.590.400	1	99.590.400		34.016.460		34,16	
	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Dokumen	5	219.652.367,17	5	99836900	5	99.836.900		9.127.000		9,14	
	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	Dokumen	1	105.800.954,21	1	59959000	1	59.959.000		12.582.000		20,98	
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan yang dikembangkan	dokumen	3	159.370.240,10	2.919	536.915.300	2.919	732.277.300		10.503.500		1,43	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	dokumen	2	138.485.027,18	1	9.464.900	1	9.464.900		3.080.500		32,55	
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	2.919	2.967.996.322,23	4.541	1.518.031.300	4.541	2.518.568.800		201.676.209		8,01	
		Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	55	17.207.045.793,56	1		1						

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	4.624.324.801,33	39	50.000.000	39	50.000.000		18.665.840		37,33	
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	387905	Ha	6.947.952.881,86	10	593.031.400	10	658.568.900		167.514.069		25,44	
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	1	1.375.552.817,64	1	49.999.900	1	170.999.900		15.496.300		9,06	
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	817	1.823.717.677,03	1	825.000.000	1	1.639.000.000		-		-	
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%	39	2.435.497.615,71	12	1.776.174.600	12	1.781.419.800		607.560.404		34,11	
		Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	%	57	6.991.212.643,40	5		5						
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Operasi	10	5.933.545.861,44	11	1.576.141.900	11	1.431.387.020		504.190.100		35,22	
		Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan		312.000	88.746.168,00	0		0	150.000.080		55.936.304		37,29	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1,00	968.920.613,96	1,00	155.989.500,00	1,00	155.989.500		37.058.000		23,76	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pengulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	1,00			44.043.200,00		44.043.200		10.376.000		23,56	
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit	12,00			46.023.000,00							
	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi					50.000.000,00		161.875.000		14.950.000		9,24	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	unit manajemen	5,00			46.023.000,00		46.023.000		6.828.500		14,84	
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi	industri	11,00			73.918.400,00		73.918.400		22.610.896		30,59	
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	-			73.918.400,00		73.918.400		22.610.896		30,59	
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayudan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil danMenengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1,00										
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha		2.843.299.456	30.503	388.295.100	30.503	388.295.100		34.658.800		8,93	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi		Jumlah Taman Hutan Raya yang dikelola	unit	1			238.312.700		238.312.700		15.716.000		6,59	
	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Operasi	3			24.203.000		24.203.000		12.347.000		51,01	
	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	Permohonan	1			204.109.700		204.109.700		-		-	
	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	Dokumen	1			10.000.000		10.000.000		3.369.000		33,69	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah penangkaran TSL non appendix yang tertib aturan	penangkaran	24	1.927.987.905,79	24	44.694.200	24	44.694.200		8.210.100		18,37	
	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	1	585.814.156,74	1	44.694.200	1	44.694.200		8.210.100		18,37	
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah KEE, Cagar Biosfer dan Geopark yang dikelola	kelompok	8	321.310.967,94	8	105.288.200	8	105.288.200		10.732.700		10,19	
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang	16	128.524.387,17	16	38.633.200	16	38.633.200		8.589.200		22,23	
	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Ha	100	715.617.361,57	100	66.655.000	100	66.655.000		2.143.500			
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	17,70	2.125.242.316	17,70	150.000.900	17,70	493.000.900		113.917.173		23,11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok	10	2.921.881.515,56	10	150.000.900	10	493.000.900		113.917.173		23,11	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	67	137.521.094,28	67	50.001.000	67	50.001.000		8.096.100		16,19	
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	kelompok	65	197.927.556,25	65	50.000.000	65	393.000.000		91.421.073		23,26	
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	1.000	2.464.695.865,03	1.000	49.999.900	1.000	49.999.900		14.400.000		28,80	
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS	4	14.296.328.273	4	149.999.900	4	149.999.900		48.682.800		32,46	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	DAS	32	82.983.248.577	32	149.999.900	32	149.999.900		48.682.800		32,46	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	Dokumen	1	328.328.399,48	1	50.000.000	1	50.000.000		40.242.800		80,49	
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen	1	27.077.312.239,95	1	50.000.000	1	50.000.000		8.440.000		16,88	
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	Unit	10		10	49.999.900	10	49.999.900		-			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Peresentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	90,31	3.017.590.900	90,31	700.000.000	90,31	675.000.000		125.423.598		18,58	Dinas PUPR
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		Jumlah peserta sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Orang	400		400	170.407.300	400	170.407.300		-			
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang						170.407.300		170.407.300		-			
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		Jumlah dokumen materi teknis dan Ranperda RTR Provinsi NTB yang tersusun	Dokumen	1		1	69.518.600	1	69.518.600		19.989.000		28,75	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRRR Kabupaten/Kota		%	90,31		90,31	69.518.600	90,31	69.518.600		19.989.000		28,75	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen	1		1	409.009.800	1	384.009.800		103.964.598		27,07	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		%	90,31		90,31	409.009.800	90,31	384.009.800		103.964.598		27,07	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		Tersedianya Bahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1		1	51.064.300	1	51.064.300		1.470.000		2,88	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		%	90,31		90,31	51.064.300	90,31	51.064.300		1.470.000		2,88	
												0,00	21,91	
Tujuan 1 : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan		Neraca pengelolaan sampah (%)	%											
Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Persampahan		Persentase Penanganan Sampah	%				70			0,00		0,00		
		Persentase Pengurangan Sampah	%				30			0,00		0,00		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengelolaan sampah	%	100	15.916.448.484	100	5.615.973.800	100						Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Persentase penanganan sampah	%	70	3.148.514.551,19	70	5.615.973.800	70						
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Dokumen	1		1	5.615.973.800	1						
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi														
Tujuan 1: Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas		Indeks Daya Beli (Point)	%											
Sasaran 1: Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan		Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar				17.814			7835		11,49		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase peningkatan investor	Persen	10	724.463.980	10	279.600.000	10	248.847.900		23.300.000		9,36	DPMPPTSP
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah dokumen	Dokumen	2	311.507.601	2	279.600.000	2	248.847.900		23.300.000		9,36	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	Kegiatan usaha	1	146.948.355	1	279.600.000	1	248.847.900		23.300.000		9,36	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Jumlah dokumen promosi	%		1.050.026.808		80			-		-		DPMPPTSP
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah dokumen	Dokumen		1.050.026.808									
	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen laporan	Dokumen		507.278.116			1						
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen laporan event	Dokumen		542.748.692			1		0				
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase permohonan izin yang terlayani sesuai persyaratan	Persen	93	780.295.837	93		93	12.756.200		-		-	DPMPPTSP
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah dokumen layanan perizinan kewenangan daerah provinsi	Dokumen	3	120.058.076	3	49.400.000	3	12.756.200					

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	Pelaku usaha	3.600	120.058.076	3.600	49.400.000	3.600	12.756.200		-			
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase perusahaan yang taat LKPM	Persen	60	1.079.612.988	60	898.700.000	60	898.700.000		204.553.000		22,76	DPMPPTSP
		Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah	Persen	60	1.079.612.988	60		60						
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	Perusahaan	500	171.888.232	500	898.700.000	500	898.700.000	0	204.553.000		22,76	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku usaha	8	541.270.764	8	501.956.800	8	501.956.800		201.470.000		40,14	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan usaha	8	366.453.992	8	396.743.200	8	396.743.200		3.083.000	-	0,78	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Cakupan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	%		171.027.294		100							DPMPPTSP
Urusan pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah dokumen rekapitulasi izin yang terbit melalui DPMPPTSP	Dokumen		171.027.294			2						
	Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen rekapitulasi izin yang terbit melalui DPMPPTSP secara OSS	Dokumen		171.027.294			2						
												0,00	14,32	
Sasaran 2: Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas		Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%				24			27,20		113,90		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Pertumbuhan Populasi Ternak	0,1		46.161.000.000	9	41329946151	9	39.935.727.251		3.775.581.050	-	9,45	Disnakwan
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Jumlah bibit ternak unggul yang dihasilkan	ekor	100		100	310546000	100	310.546.000		155.744.000			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	1		1	310546000	1	310.546.000		155.744.000			
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Luas lahan HPT yang dikelola	Ha	30	1.735.256.154	30	70436000	30	195.436.800		122.500.000	-	62,68	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	1	1.735.256.154	1	70436000	1	195.436.800		122.500.000	-	62,68	
		Laporan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan mutu pakan yang dihasilkan	laporan	1	1.277.279.138	1		1				-		
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah Semen Beku dihasilkan	Straw	145000	805.060.426	145000	416792951	145000	568.692.951	-	363.824.350		63,98	
		Jumlah HPT yang dihasilkan	Ton	70	472.218.712	70		70		-				
	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan	2		2	351875000	2	503.775.000		360.992.350		71,66	
		Pakan ternak yang dihasilkan	ton	25		25		25						

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	Ton	5		5	49995000	5	49.995.000		2.640.000		5,28	
		Sampel Straw yang diperiksa	sample	200		200		200						
	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Laporan	1		1	14922951	1	14.922.951		192.000		1,29	
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah bibit ternak yang diadakan (Ekor)	ekor	1000		1000	40532171200	1000	38.861.051.500		3.133.512.700		8,06	
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakan	Ekor	1000		1000	40399671100	1000	38.728.551.400		3.059.071.500		7,90	
		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	0		0		0						
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah alat pengolah pakan yang diadakan	unit	15		15	132500100	15	132.500.100		74.441.200		56,18	
		Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ton	0		0		0						
		Jumlah Kelompok Pakan	Kelompok	30		30		30						
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		CAKUPAN PENGEMBANGAN WILAYAH SUMBER BIBIT TERNAK (PERSEN)	Persen	100	582.000.001	100	30.000.100	100	30.000.100		-		20,36	Disnakan
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah sumber bibit ternak yang dikembangkan	Lokasi	2	277.207.623	2	30.000.100	2	30.000.100		-			
		Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan	0	206.477.480	0	15.000.100	0	15.000.100	-	-			
		Laporan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak	Laporan	1	70.730.143	1		1		-				
	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Frewensi Pengawasan	kali	12	304.792.377	12	15.000.000	12	15.000.000		-			
		Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan	0	149.092.137	0		0						
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	%	<1	2.884.999.999	<1	590.100.235	<1	590.100.235		240.261.425		40,72	Disnakan
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah PHMS yang dikendalikan (Penyakit)	Penyakit	5	980.180.067	5	210.000.235	5	210.000.235		62.883.975		29,94	
	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Vaksin Anthrax, SE, Rabies dan AI yang diadakan	Dosis	30050	344.800.812	30050	105.000.160	30050	105.000.160		4.060.000	-	3,87	
		Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	0	216.182.805	0		0						
	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen pemetaan yang dihasilkan	Dokumen	1	419.196.451	1	44.999.975	1	44.999.975		27.914.375		62,03	
		Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	0	531.226.609	0		0						
	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	0	191.801.772	0	60.000.100	0	60.000.100		30.909.600		51,52	
		Jumlah obat dan peralatan pelayanan	jenis	40	178.840.198	40		40						
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Produk Peternakan/ RPH/RPU/TPH di awasi (Unit)	unit	61	160.584.639	61	45.100.000	61	45.100.000		13.128.850		29,11	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan	0	936.320.191	0	14.999.900	0	14.999.900		3.473.750		23,16	
		Laporan hasil penilaian resiko keamanan produk hewan	laporan	1	218.156.134	1		1		-				
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Frekwensi pengawasan Penerapan persyaratan teknis produk ternak	kali	4	505.889.844	4	15.000.100	4	15.000.100	-	9.655.100		64,37	
		Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	0	212.274.213	0		0		-				
	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Frekwensi pengawasan dan pemasukan produk hewan	kali	12	437.273.131	12	15.100.000	12	15.100.000		-		-	-
		Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Laporan	0	217.242.515	0		0		-				
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Jumlah RPH dan Kelompok Pengolah Hasil peternakan yang tersertifikasi	Unit	5	220.030.616	5	310.000.000	5	310.000.000		155.270.000		50,09	
		Jumlah Unit Usaha Produk Peternakan/ RPH/RPU/TPH di awasi (Unit)	Unit	61		61		61						
	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah UMKM Ber NKV/ Bersertifikat dibina	unit usaha/kelompok	15		15	235.000.000	15	235.000.000		146.540.000			
		Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner												
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pemeriksaan laboratorium penyakit hewan yang tersedia (Pnyakit)	Penyakit	5		5	75.000.000	5	75.000.000		8.730.000			
Kesejahteraan Hewan		Jumlah Pemotongan Betina Produktif yang dikendalikan di RPH (%)	Persen	1		1	25.000.000	1	25.000.000		8.978.600			
	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Kasus	0		0	25.000.000	0	25.000.000		8.978.600			
		Jumlah RPH diawasi	unit	61		61		61						
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	%	100	436.021.633	100	1.286.870.800	100	1.286.870.800		64.175.000		4,99	Disnakwan
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jenis produk hasil peternakan yang dipamerkan (Kegiatan)	Kegiatan	10	260.536.230	10	44.996.000	10	44.996.000		12.530.000		27,85	
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Frekwensi expo/pameran	kegiatan	10	260.536.230	10	44.996.000	10	44.996.000		12.530.000		27,85	
		Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	0	175.485.402	0		0						
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah Kelompok berbasis Korporasi yang dibina (Korporasi)	Korporasi	3	93.430.599	3	1.241.874.800	3	1.241.874.800	-	51.645.000		4,16	
	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah koorporasi terbentuk	Koorporasi	3	44.498.718	3	1.191.874.800	3	1.191.874.800	-	42.735.000		3,59	
	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah koorporasi yang dievaluasi	lembaga	5	37.556.085	5	50.000.000	5	50.000.000	-	8.910.000			
		Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Laporan	0		0		0						
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Fasilitas Sarana Pertanian	%	2,05	64.204.913.319	2,05	8.407.861.600	2,05	20.913.737.700		838.060.200		4,01	Distanbun
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	3	14.375.159.070	3	4.559.000.000	3	12.712.345.000		17.190.000		0,14	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	3	14.375.159.070	3	4.559.000.000	3	12.712.345.000		17.190.000		0,14	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Persentase Bantuan Benih/sarana pendukung budidaya Yang Termaafatkan	%	100	49.305.227.080	100	3.848.861.600	100	8201392700		820.870.200		10,01	
		Persentase Perbanyakan Benih Tanaman	%	100	35.677.829.400	100		100	62.000.000		10.859.000			
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	4	7.006.789.800	4	3.441.040.900	4	900.000.000		46.680.700		5,19	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Kg	51.000	6.620.607.880	51.000	320.000.000	51.000	370.250.000		319.573.300		86,31	
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih			35.677.829.400		87.820.700		6.869.142.700		443.757.200		6,46	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Pengembangan industrialisasi pertanian	unit/paket	2	267.360.989.055	2	108.880.013.592	2	130.000.608.492		28.308.218.953		21,78	Distanbun
		Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian	%	96,79	-	96,79		96,79						
Penataan Prasarana Pertanian		Persentase Jalan Usaha Tani, Jaringan Irigasi (termasuk prasarana pendukung irigasi) dan Prasarana Pertanian Yang Dimanfaatkan	%	100	210.857.059.574	100	122.186.564.697	100	130.000.608.492		28.308.218.953		21,78	
		Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana UPTD yang termanfaatkan	%	100	111.490.096.051	100		100						
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	1	35.937.090.995	1	90.903.192.592	1	90.305.683.589		18.622.859.400		20,62	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	0	63.429.872.528	0	16.976.821.000	0	15.771.700.050		2.772.600.000		17,58	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1		1	1.000.000.000	1	713.620.000		3.339.017.553			
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	3		3	13.306.551.105	3	23.209.604.853		3.573.742.000			
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%	96,5	1.229.042.136	96,5	32.500.000	96,5	32.500.000		23.775.000		73,15	Distanbun
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari Serangan OPT dan DPI	%	95	802.442.000	95	32.500.000	95	32.500.000		23.775.000		73,15	
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	2967	802.442.000	2967	32.500.000	2967	32.500.000		23.775.000		73,15	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%	100	18.894.573.000	100	1.417.411.000	100	584.012.500		341.006.032		58,39	Distanbun
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Persentase BPP yang operasional	%	100	7.854.246.000	100	1.417.411.000	100	584.012.500		341.006.032		58,39	
		Persentase Siswa Lulus yang bekerja di bidang pertanian	%	5	7.854.246.000	5	140.000.000	5						
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	orang/bulan	144	7.854.246.000	144	1.276.423.500	144	584.012.500		341.006.032		58,39	
		Jumlah Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	kegiatan	9	7.854.246.000	9		9						
	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	0	2.546.319.100	0	425.000.000	0						
		Jumlah Petani yang mendapatkan penyuluhan dan kegiatan pemberdayaan petani	orang	60	1.785.504.100	60		60						

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL		Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	10		10	1.863.000.000	10	4.609.316.000		1.656.328.170		35,93	Dislutkan
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi							1.633.000.000		4.055.521.000		1.331.668.170		32,84	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen	1		1	1.000.000	1	76.244.000		1.244.000		1,63	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		259.294		259.294	1.624.000.000	259.294	3.979.277.000		1.330.424.170		33,43	
	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Orang	110		110	4.500.000	110						
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	6		6	3.500.000	6						
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil diluar gas dan minyak bumi yang mendapatkan izin	unit	15		15	5.000.000	15	3.995.000		-			
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomenda si	10		10	1.000.000	10	3.995.000		-			
	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Rekomenda si	15		15	4.000.000	15						
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							225.000.000		549.800.000		324.660.000			
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	200		200	225.000.000	200	549.800.000		324.660.000			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		produksi perikanan tangkap	%	256.572		256.572	#REF!	256.572	24.536.622.500		1.430.157.838		5,83	Dislutkan
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil							1.699.500.000		2.792.762.500		1.040.054.498		37,24	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1		1	1.000.000	1						
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	5		5	1.000.000	5						
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	36		36	1.697.500.000	36	2.792.762.500		1.040.054.498		37,24	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT							3.000.000		2.275.000		263.600			
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1		1	1.000.000	1						
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rekomenda si	36		36	1.000.000	36	1.275.000		263.600			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Dokumen	1		1	1.000.000	1	1.000.000		-			
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil							2.000.000							
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1		1	1.000.000	1						
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rekomenda si	50		50	1.000.000	50						
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							2.000.000							
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1		1	1.000.000	1						
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Dokumen	500		500	1.000.000	500						
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi							21.098.000.000		21.739.585.000		389.839.740		1,79	
	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan perikanan	2		2	1.000.000	2	1.000.000		-		-	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	5		5	2.000.000	5	2.021.500.000		6.980.000		0,35	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	4		4	21.095.000.000	4	19.717.085.000		382.859.740			
	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Rekomenda si	50		50	2.000.000	50						
Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT							2.000.000		2.000.000		-			
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1		1	1.000.000	1	1.000.000		-			
	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomenda si	220		220	1.000.000	220	1.000.000		-			
Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							2.000.000							

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)				
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu						
	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomenda si	550		550	2.000.000	550							
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.243.385		1.243.385	3.904.300.000	1.243.385	4.328.346.700		626.870.770		14,48	Dislutkan	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							2.000.000		968.000		-				
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomenda si	5		5	1.000.000	5							
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Dokumen	1		1	1.000.000	1	968.000		-		-		
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut							3.902.300.000		4.327.378.700		626.870.770		14,49		
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	9		9	1.001.000.000	9	423.195.000		24.982.000		5,90		
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang tersedia	Unit	4		4	1.050.000.000	4	1.544.732.700		191.111.800		12,37		
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	7		7	929.000.000	7	500.250.000		112.114.600		22,41		
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan air payau dan air tawar yang tersedia	Unit	6		6	921.300.000	6	1.859.201.000		298.662.370		16,06	Dislutkan	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Orang	10		10	1.000.000	10							
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	12		12	3.000.000	12							
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	12		12	1.000.000	12							
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	12		12	1.000.000	12							
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Produksi olahan hasil perikanan	Ton	215700		215700	239.000.000	215700	199.176.900		28.033.400		14,07	Dislutkan	
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi penerbitannya	izin				10.000.000		24005900		20.962.400				
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomenda si	5		5	9.000.000	5	4005900		1.004.900				

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	3		3	1.000.000	3	20000000		19.957.500			
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan	ton	215700		215700	224.000.000	215700	170.171.000		6.171.000		3,63	
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Unit usaha	26		26	224.000.000	26	170.171.000		6.171.000		3,63	
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah stok ikan yang tersedia dan tersalurkan sebagai bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	ton				5.000.000		5.000.000		900.000		18,00	
	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	15		15	1.000.000	15	1.000.000		900.000			
	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	Unit usaha	35		35	4.000.000	35	4.000.000		-		-	
												0,00	25,65	
Sasaran 3: Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin		Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%)	%				100			0,00		0,00		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%		-		85						24,71	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase PMB,KPO, KTK (Korban Tindak Kekerasan) dan OT yang tertangani	%	100	2.356.150.635	100	440.124.000	100	438.124.000		194.091.083		38,63	Dinas Sosial
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Tertanganinya PMI bermasalah, KTK dan KPO	Orang	400		400	440.124.000	400	438.124.000,00		194.091.083		0,00	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Orang	300		300	440.124.000	300	438.124.000,00		194.091.083		35,22	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	4,5	53.397.902.044	4,5	15.471.016.525	4,5						Dinas Sosial
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya keberfungsian sosial disabilitas terlantarr	Orang	400		400	631.000.000	400						
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	500		500	589.000.000	500						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	1		1	42.000.000	1						

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian				
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	Kinerja (%)	Keuangan (%)		
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti		Terlaksananya keberfungsian sosial PPKS di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jiwa	60		60	964.294.700	60							
		Terlaksananya keberfungsian sosial PPKS	Orang	80		80		80							
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	1		1	40.110.000	1							
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan pembedayaan	Orang	50		50		50							
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	80		80	364.400.000	80							
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	80		80	44.075.000	80							
	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	80		80	10.275.000	80							
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	40		40	49.634.700	40							
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	80		80	45.000.000	80							
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	80		80	4.800.000	80							
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	80		80	316.000.000	80							
	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	80		80	90.000.000	80							
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		Terlaksananya keberfungsian sosial anak terlantar	Orang	5120		5120	13.875.721.825	5120							
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	710		710	3.939.515.000	710							
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	770		770	197.450.000	770							
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	770		770	155.139.500	770							
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	770		770	218.522.425	770							
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	710		710	696.084.400	710							
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Laporan	17		17	4.228.919.500	17							
		Jumlah Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak Terlantar dalam Panti	Anak	5000		5000	3.963.366.000	5000							

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)				
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu		
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	530		530	102.000.000	530							
	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	80		80	90.000.000	80							
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	80		80	271.125.000	80							
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	50		50	3.600.000	50							
	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	50		50	10.000.000	50							
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	37.283.915.612	100	23.778.085.000	100	20.261.540.000		1.880.402.820		9,28	Dinas Sosial	
		Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	50		50		50							
Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		Terlaksananya pengangkatan anak oleh orang tua tunggal	Orang	3		3	21.775.000	3	21.775.000		-				
	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	3		3	21.775.000	3	21.775.000,00		-				
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		Terlaksananya verval data	%	100		100	23.756.310.000	100	20.239.765.000		1.880.402.820		9,29		
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	150		150	40.000.000	150	40.000.000		-				
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Keluarga	1000		1000	18.547.310.000	1000	14.796.060.000		1.880.402.820	-	12,71		
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	150		150	5.169.000.000	150	5.403.705.000		-		-		
												0,00	16,23		
Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan		Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor				87			0,00		0,00			
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		Persentase Lumbung Pangan yang dimanfaatkan	%		770.871.786		87					100,0		Dinas Ketahanan Pangan	
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Infrastruktur lumbung pangan dan sarana pendukungnya	Persen		770.871.786		9					-			
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang dibangun	Unit		594.908.418		6					-			
	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang dibangun	Unit		45.000.000		1					-			
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Kemandirian Pangan yang dibangun	Unit		130.963.367		2					-			
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	100,00	770.949.100	100,00	316.264.500	100,00	891.264.500		101.768.318		11,42	Dinas Ketahanan Pangan	
		Rata-Rata Konsumsi Energi	KKal/Kap/Hari	2643,10	303.393.880	2643,10		2643,10							
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Tingkat Ketersediaan Energi	KKal/Kap/Tahun	8.294,57	770.949.100	8.294,57	115.000.000	8.294,57	115.000.000		68.278.770		59,37		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	-	1.018.510.000	-	30.000.000	-	30.000.000		18.660.000		62,20	
		Jumlah Jenis Laporan Analisis Ketersediaan Pangan	Dokumen	2	9.373.297.884	2		2						
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber	Jumlah Stok Cadangan Masyarakat (CPM)	Ton	1	770.949.100	1	25.000.000	1	25.000.000		18.367.020		73,47	
		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	-	303.393.880	-		-						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Jenis Laporan Analisis Distribusi Pangan	Dokumen	2	230.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000		21.043.750		70,15	
		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	-	265.000.600	-		-						
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	-	275.948.500	-	30.000.000	-	30.000.000		10.208.000		34,03	
		Jumlah LDPM/PUPM/Pasar Mintra Tani yang dtbina	Unit	1	1.018.510.000	1		1						
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Stok Cadangan Pangan Pemerintah	Persen	23	1.018.510.000	23	35.000.000	23	660.000.000		6.150.000		0,93	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengada	Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi	Ton	2	9.373.297.884	2	35.000.000	2	660.000.000		6.150.000		0,93	
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	-	242.509.084	-		-						
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Rasio konsumsi sayur dan buah terhadap konsumsi ideal	Persen	90	9.130.788.800	90	166.264.500	90	116.264.500		27.339.548		23,51	
	Promosi Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Event Promosi yang diikuti	Event	1		1	16.264.500	1	16.264.500		1.400.500			
		Jumlah Promosi Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	-		-		-						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	1		1	150.000.000	1	100.000.000		25.939.048			
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prevalensi Ketidakkukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	%	5	1.268.451.063	5	100.000.000	5	100.000.000		27.915.500		27,92	Dinas Ketahanan Pangan
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan yang difasilitasi	Desa	14	1.268.451.063	14	100.000.000	14	100.000.000		27.915.500		27,92	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen	1	540.951.063	1	30.000.000	1	30.000.000		19.420.000			
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penduduk rentan rawan pangan yang difasilitasi bantuan hibah pangan	Orang	250	727.500.000	250	70.000.000	250	70.000.000		8.495.500		12,14	
		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi												
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	Persen	90	1.857.153.698	90	60.000.000	90	140.000.000		65.304.300		46,65	Dinas Ketahanan Pangan
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi	Komoditi	20	495.420.000	20	60.000.000	20	140.000.000		65.304.300		46,65	
	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Frekwensi Bimwas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Kali	4	495.420.000	4	40.000.000	4	30.000.000		16.140.000		53,80	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
		Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	828.192.667	-	-	-	50.000.000		27.937.300		55,87	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diuji	Komoditi	20	533.541.031	20	20.000.000	20	40.000.000		18.713.000		46,78	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen	0	252.737.289	0	-	0	20.000.000		2.514.000		12,57	
			Komoditi						100		20		20,00	37,02
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin		Cakupan Air Minum	%						81		0,00		0,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Cakupan Air Minum	%	81	10.224.348.000	81	2.749.273.400	81	1.829.057.500,0		2.013.885.600		110,11	Dinas PUPR
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah sambungan rumah/KK terlayani SPAM Jaringan perpipaan yang dibangun	SR	240	-	240	2.749.273.400	240	1.829.057.500,0		2.013.885.600		110,11	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM						1.070.215.900							
	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah/KK terlayani SPAM Jaringan perpipaan yang dibangun	%	81	-	81	1.679.057.500	81	1.829.057.500,0		2.013.885.600		-	110,11
													0,00	110,11
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin		Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%						82		0,00		0,00	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%		-		100							Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha	84.511	587.290.665.869	84.511	377.914.567.400	84.511	401.664.617.400		136.731.814.510		34,04	Dinas Perumahan dan Permukiman
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman			%	100	-	100	377.914.567.400	100	401.664.617.400		136.731.814.510			
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	-	1.029.079.161	-	377.914.567.400	-	401.664.617.400		136.731.814.510		-	34,04
		Jumlah penanganan PSU permukiman	Paket	1.159	1.029.079.161	1.159	-	1.159	-		-		-	34,04
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin		Rasio Elektrifikasi	%						100		0,00		0,00	
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN		Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	%	19	1.882.329.210	19	54.967.900	19	109972900	20,44	33.143.320	106,57	30,14	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	%	6	214456005,9	6		6		54,41		976,84		
Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun		Persentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	Rekomendasi	2	131729920,1	2	19.999.700	2	24999700	2	17.523.320	100,00	70,09	
		Meningkatnya penggunaan sarana EBT	%	6	82726085,73	6	-	6	-	2	-	35,91	-	-
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun			1667873204		9.999.800		9999800	0	6.843.320		68,43	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Izin	2	356100248,8	2	9.999.900	2	14999900	0	10.680.000	-	71,20	
Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi		Meningkatnya penggunaan sarana EBT	%	6	1043699463	6	34.968.200	6	84973200	0	15.620.000		18,38	
	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah kebijakan	Dokumen	1		1	10.497.400	1	10497400		3.440.000			
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	Orang	100		100	14.970.800	100	14970800		7.500.000			
	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah fasilitas EBT yang dibangun	Unit	20		20	9.500.000	20	59505000		4.680.000			
		Jumlah fasilitas EBT yang di Rehabilitasi												
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	100	5379628786	100	170.899.000	100	170899000	100	35.340.000	100,01	20,68	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Rasio elektrifikasi (%)	%	100	285942199	100		100	35649000	20	19.560.000	20,00		
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Persentase rumah tangga berlistrik			178715304,1		46.649.000			50				
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	Rekomenda si	32	107226894,9	32	21.399.000	32	15399000	10	10.840.000	31,25		
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi	Izin	32	285885367,4	32	20.250.000	32	20250000	0	8.720.000		43,06	
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	-	178694215,6	-	5.000.000	-		0				
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Meningkatnya rasio elektrifikasi	%	100	107191151,8	100	124.250.000	100	135250000	0	15.780.000		11,67	
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	RTS	50		50	124.250.000	50	135250000		15.780.000			
												171,32	41,71	
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin		Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%				69			0,00		0,00		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase rumah tangga menempati hunian layak	%	99	7.063.959.946	99	271.560.300	99	427.073.700		27.569.042		6,46	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%	100	-	100		100						
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Jumlah data rumah terdampak bencana	%	100	1.227.471.539	100	69.648.700	100	32.818.400		13.778.600		41,98	
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah dokumen perndataan rumah terdampak bencana	Dokumen	1	620.411.785	1	34.991.000	1	16.015.000		7.241.500		45,22	
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Persentase penerima bantuan rumah terdampak bencana yang terverifikasi	%	100	607.059.754	100	34.657.700	100	16.803.400		6.537.100		38,90	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Jumlah data rumah terdampak yang valid	%	100	997.844.228	100	60.950.300	100	317.031.500		12.262.442		3,87	
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi rehabilitasi rumah terdampak bencana	OK	70	425.158.412	70	30.190.000	70	13.031.500		-		-	
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi mengenai program perumahan	OK	80	4.838.644.180	80	30.760.300	80	304.000.000		12.262.442		4,03	
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Jumlah rumah yang terbangun sesuai data verifikasi dan validasi	%	100		100	140.961.300	100	77.223.800		1.528.000			
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Unit rumah	-		-	140.961.300	-	77.223.800		1.528.000		-	
		Persentase rumah yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana dan relokasi permukiman	Unit	10		10		10						
												0,00	20,07	
Sasaran 6: Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok		Inflasi	%				3,0 - 4,0			0,25		-8,33		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Cakupan Pengawasan an Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	%	80	874.409.856	80	189.998.900	80	169.998.900		61.920.000		36,42	Dinas Perdagangan
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor		Persentase Izin Usaha Distributor Minuman Beralkohol (MB) yang diterbitkan	%	50	90.000.000	50	45.000.000	50	45.000.000		17.420.000		38,71	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	7	90.000.000	7	45.000.000	7	45.000.000		17.420.000		38,71	
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Izin Usaha Distributor Bahan Berbahaya (B2) yang diterbitkan	Persen	50	93.000.000	50	44.998.900	50	44.998.900		13.940.000		30,98	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen	6	93.000.000	6	44.998.900	6	44.998.900		13.940.000		30,98	
		Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen	0	186.000.000	0		0						
Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar		Persentase Kepatuhan Usaha Perdagangan B2 sesuai Ketentuan Berlaku	Persen	100	93.000.000	100	100.000.000	100	80.000.000		30.560.000		38,20	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen	6	93.000.000	6	50.000.000	6	40.000.000		11.680.000		29,20	
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Laporan	6		6	50.000.000	6	40.000.000		18.880.000			
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	4	5.179.316.326	4	205.000.000	4	740.500.000		659.670.903		89,08	Dinas Perdagangan
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi			Laporan	8	80.000.000	8	50.000.000	8	40.500.000		26.387.210		65,15	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Persen	100	40.000.000	100	29.781.000	100	25.281.000		16.856.815		66,68	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Persen	100	40.000.000	100	20.219.000	100	15.219.000		9.530.395		62,62	
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			Persen	100	250.000.000	100	120.000.000	100	665.000.000		615.936.647		92,62	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	12	100.000.000	12	33.000.000	12	33.000.000		23.149.467		70,15	
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	12	150.000.000	12	87.000.000	12	632.000.000		592.787.180		93,80	
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya			Persen	95		95	35.000.000	95	35.000.000		17.347.046			
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	4		4	35.000.000	4	35.000.000		17.347.046			
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang			4.070.555.572		321.967.600		300.007.700		99.304.350	227,93	33,10	Dinas Perdagangan
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		Persentase Produk Unggulan Daerah yang terjual pada Pameran Dagang	Persen	50	1.800.000.000	50	321.967.600	50	300.007.700		99.304.350		33,10	
	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku usaha	12	850.000.000	12	50.000.000	12	46.500.000		-		-	
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku usaha	12	200.000.000	12	181.500.000	12	68.435.000		52.744.350		77,07	
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	10	300.000.000	10	7.967.000	10	105.717.000		-			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing pariwisata		Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)	Rp. Milyar				137			49,35		35,96		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase desa wisata yang dikembangkan	%	100	16.580.012.830	100	6.451.999.000	100	6187145973		1.656.099.400		26,77	Dinas Pariwisata
		Persentase Geosite yang tertata	%	50	-	50		50						
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi					325.955.000		10.000.000		10000000		6.000.000		60,00	
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)					10.000.000		10000000		6.000.000		60,00	
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah Kawasan Pariwisata Terstandar yang Terbangun	Kawasan	3	378.843.500		10.000.000		10000000		5.090.000			
	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Kawasan	1	750.075.000	30	10.000.000	30	10.000.000		5.090.000		50,90	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Peningkatan Persentase Destinasi Pariwisata yang Minimal Berkembang	Persen	14,14		3	6.432.000.000	3	6.157.146.973		1.639.400.400		26,63	
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	17		1	6.232.000.000	1	5.704.411.000		1.481.294.900		25,97	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	15	2.000.408.500		267.380.973		452.735.973		158.105.500		34,92	
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Pariwisata yang Kredibel	Persen	30			9.999.000		9.999.000		5.609.000		56,10	
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	3			9.999.000		9.999.000		5.609.000		56,10	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	orang	5.200.000	7.391.905.747	5.200.000	1.393.171.100	5.200.000	3.849.816.100		1.753.496.000		45,55	Dinas Pariwisata
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	3.000.000	5.036.461.400	3.000.000	1.393.171.100	3.000.000	3.849.816.100		1.753.496.000		45,55	
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	5	1.341.839.200	5	1.011.533.200	5	1.218.533.200		603.136.000		49,50	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	13	2.756.400.000	13	300.000.000	13	2.549.645.000		1.148.375.500		45,04	
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	4	300.005.000	4	3.637.900	4	3.637.900		1.984.500		54,55	
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	5	638.217.200	5	78.000.000	5	78.000.000		-		-	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	%	100	606.633.173	100	371.240.600	100	3.958.651.600		692.079.955		17,48	Dinas Pariwisata
		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah Memiliki HaKI	Persen	40,21	5.270.345.000	40,21		40,21						
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Persentase Peningkatan Kapasitas Pemasaran Ekonomi Kreatif	Persen	10	150.000.000	10	371.240.600	10	3.958.651.600		692.079.955		17,48	
	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Laporan	14	2.143.212.500	14	201.240.600	14	3.801.240.600		621.629.955		16,35	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Laporan	6	1.200.000.000	6	150.000.000	6	137.411.000		70.450.000		51,27	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Laporan	3	277.132.500	3	20.000.000	3	20.000.000		-			
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%	100	3.506.228.054	100	137.010.000	100	114.421.000		3.990.000		3,49	Dinas Pariwisata
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Persentase Peningkatan Jumlah Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjut	Persen	5	2.500.000.000	5	137.010.000	5	114.421.000		3.990.000		3,49	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	240	1.035.093.720	240	80.000.000	240	57.411.000		-			
	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Orang	480	253.661.760	480	57.010.000	480	57.010.000		3.990.000		7,00	
												0,00	34,28	
Tujuan 3: Terwujudnya perindustrian yang unggul		Pertumbuhan Industri (%)	%											
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing industri		Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Milyar				180			-2,43		-1,35		
PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%	100	102.322.211.223	100	5.939.697.710	100	6.698.083.910		1.815.314.359		27,10	Dinas Perindustrian
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%	100		100		100				20,00		
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan industri yang tersusun	Dokumen	1		1	5.939.697.710	1	6.698.083.910		1.815.314.359		100,00	27,10
		Jumlah Masyarakat penerima hibah barang	orang	100		100		100				100,00		
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1		1	248.091.710	1	83.170.000		47.288.000		0,00	56,86
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	0		0	75.000.000	0	75.000.000		24.917.860		25,00	33,22
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1		1		1					12,50	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1		1	270.000.000	1	152.443.200		63.700.663		0,00	41,79
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1		1	725.691.710	1	1.150.691.710		324.725.541			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1		1	4.576.122.500	1	5.236.779.000		1.354.682.295			
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase IKM yang Meningkatkan dari Kecil ke Menengah	%	3,55	3.018.338.892	3,55	199.850.000	3,55	1.225.320.000		17.801.608		1,45	Dinas Perindustrian

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		Jumlah pengawasan izin usaha yang dilakukan	Kali	30		30	199.850.000	30	1.225.320.000		17.801.608	19,02	1,45	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Dokumen	0		0	161.000.000	0	161.000.000		8.161.608	2,14	5,07	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Dokumen	1		1	38.850.000	1	1.064.320.000		9.640.000	100,00	0,91	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Cakupan database IKM se NTB dalam sistem informasi industri nasional	%	1	2.043.024.494	1	150.000.000	1	120.000.000		27.239.260		32,76	Dinas Perindustrian
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah informasi industri yang tersusun	Dokumen	1		1	150.000.000	1	120.000.000		27.239.260	11,23	22,70	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1		1	75.000.000	1	45.000.000		18.080.000	0,00	40,18	
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Dokumen	1		1	75.000.000	1	75.000.000		9.159.260	50,00	12,21	
PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					4.806.536.363		365.066.500		410.456.500		33.629.440		8,19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan							365.066.500		410.456.500		33.629.440		8,19	
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit usaha	0,00		0,00	332.643.300	0,00	378.033.300		33.629.440		8,90	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)				
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu		
		Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha	PUK	50,00		50,00		50,00							
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	500,00		500,00	32.423.200	500,00	32.423.200		-				
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM			7.967.004.066		815.614.600		754.238.600		217.850.680		-	28,88	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Pelaku UMKM yang Mendapatkan Pelayanan Penyuluhan Hukum	orang	420		420	462.433.500	420	754.238.600		217.850.680				
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit usaha	-		-	462.433.500	-	417.543.500		217.850.680				
		Jumlah yang difasilitasi peningkatan akses pemasaran jaringan usaha melalui Promosi/Expo dan Pameran di Provinsi lainnya	PUK	50		50		50							
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Mendapatkan Pelayanan Penyuluhan Hukum	Orang	300		300	353.181.100	300	336.695.100		-		-		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100	100	100	3.350.050.780	100	3.930.174.800		814.123.700			20,71	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	100	100		100							
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		Terlaksananya Pelatihan Kecakapan Pemuda	Orang	160	160	160	3.350.050.780	160	3.930.174.800		814.123.700			20,71	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah pemuda pelopor yang terseleksi untuk tingkat nasional	Orang	1	15	1	125.000.000	1	117.500.000		17.500.000			14,89	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah wirausaha muda yang mengikuti pelatihan	Orang	100	18	100	25.000.000	100	25.000.000		25.000.000			100,00	
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	0	20	0	885.050.780	0	1.070.174.800		58.373.800			5,45	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terpelihara	Unit	1	60	1		1							
	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Lembaga atau Organisasi Kepemudaan yang Difasilitasi	Lembaga	20		20	2.215.000.000	20	2.610.000.000		700.000.000				
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	Orang	25		25	100.000.000	25	107.500.000		13.249.900				
												31,42	22,55		
Sasaran 2: Menurunnya pengangguran terbuka		Tingkat Pengangguran Terbuka	%							3,73	82,33				
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	18	3.481.991.780	18	628.276.660	18	628.276.660	8,35	204.357.000	46,4	32,53	Dsinakertrans	
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	orang	120	3.241.733.400	120	409.989.940	120	609.989.720	0	189.358.000	-	31,04		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	300	1.092.070.448	300	409.989.720	300	369.999.720	0	189.358.000	-	-	
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Dokumen	2	2.044.288.965	2	200.000.000	2	239.990.000	0	-	-	-	
	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang di Akreditasi	LPK	10	105.373.987	10	15.000.140	10	15.000.140	10	14.999.000	100,00	99,99	
	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	LPK	10	147.454.000	10	15.000.140	10	15.000.140	10	14.999.000	100,00	99,99	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah peserta money yang telah mendapat pekerjaan (forma/ informal)	OT	20	147.454.000	20	3.286.800	20	3.286.800	0	-	-	-	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	20	92.804.380	20	3.286.800	20	3.286.800	0	-	-	-	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	57,48	3.391.251.944	57,48	375.000.000	57,48	339.379.500	17,54	34.956.300	30,5	10,30	Dsinakertrans
	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja AKAD / AKL Yang Dibina.			910.699.800		21.456.000		19.089.000	0	3.745.700		19,62	
	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Orang	30	910.699.800	30	21.456.000	30	19.089.000	0	3.745.700	-	19,62	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	orang	2.000	388.974.000	2.000	14.084.300	2.000	14.084.300	0	1.250.000	-	8,88	
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	2.000	388.974.000	2.000	14.084.300	2.000	14.084.300	0	1.250.000	-	8,88	
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.	orang	29.240	1.995.499.514	29.240	332.766.700	29.240	299.513.200	14780	29.960.600	50,55	10,00	
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	1.600	618.360.000	1.600	114.209.700	1.600	94.466.200	310	19.902.600	19,38	21,07	
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	Orang	27.500	1.033.252.214	27.500	18.557.000	27.500	5.047.000	14470	1.248.000	52,62	24,73	
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	140	343.887.300	140	200.000.000	140	200.000.000	0	8.810.000	-	4,41	
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan	Orang	95	96.078.630	95	6.693.000	95	6.693.000	0	-	-	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan	Orang	95	96.078.630	95	6.693.000	95	6.693.000	0	-	-	-	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perusahaan	%	23	1.170.630.908	23	1.332.005.100	23	1.331.005.100	15,93	715.125.100	69,3	53,73	Dsinakertrans
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	perusahaan	50	743.997.600	50	115.105.100	50	114.105.100,00	0	11.555.100	-	10,13	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	50	447.631.500	50	25.055.100	50	24.055.100	20	11.555.100	40,00	48,04	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	11	296.366.100	11	90.050.000	11	90.050.000	5	-	45,45	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		Jumlah jenis dokumen upah minimum yang ditetapkan	SK	11	426.633.308	11	1.216.900.000	11	1.216.900.000	0	703.570.000	-	57,82	
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	SK	11	281.633.308	11	12.500.000	11	12.500.000	0	-	-	-	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	11000	145.000.000	11000	1.204.400.000	11000	1.204.400.000	10000	703.570.000	90,91		
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%	23	3.466.483.655	23	241.516.400	23	311.658.060	7,65	102.976.500	33,3	33,04	Dsinakertrans
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan	perusahaan	90	3.466.483.655	90	241.516.400	90	311.658.060	87	102.976.500	96,67	33,04	
	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan	115	269.601.295	115	44.533.600	115	87.201.800	0	21.303.800	-	24,43	
	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus	150	320.895.558	150	55.388.600	150	71.922.100	10	21.935.000	6,67		
	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	710	232.905.050	710	141.594.200	710	152.534.160	14	59.737.700	1,97		
												26,12	24,12	
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan														
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani		Indeks Kriminalitas	Point											
Sasaran 1: Meningkatkan Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat		Persentase penurunan konflik sosial	%							0,00		0,00		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%	10	1.526.591.849	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000		329.815.840		32,98	Bakesbangpolda gri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Wawasan Kebangsaan	Dokumen	3	562.456.540,81	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000		329.815.840		32,98	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	500	-	500	836.000.000	500	836.000.000,00		238.228.460			
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	1	383.444.004,09	1	164.000.000	1	164.000.000,00		91.587.380		55,85	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	11,43	11.105.209.927	11,43	3.245.564.000	11,43	7.004.313.100		1.354.508.040		19,34	Bakesbangpolda gri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen	1	3.191.596.560,53	1	3.245.564.000	1	7.004.313.100		1.354.508.040		19,34	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Tahun 2023										Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	Kinerja (%)	Keuangan (%)			
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	100	855.085.701,90	100	1.145.445.000	100	6.586.198.100		1.117.504.800		16,97			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	100	303.454.831,72	100	212.349.000	100	244.885.000		103.372.000		42,21			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	1	125.732.088,37	1	50.660.000	1	173.230.000		133.631.240		77,14			
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	1	1.907.323.938,74	1	1.837.110.000	1								
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%	100	292.643.073.798	100	67.963.466.918	100	76.245.000.918		15.227.092.775		19,97	Biro Kesejahteraan Rakyat		
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		Terfasilitasinya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual	%	100	100.348.573.728	100	31.882.918.068	100	36.412.213.500,00		11.234.690.975		30,85			
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit	4	89.954.926.705	4	30.757.919.908	4	34.169.265.240,00		10.969.090.775		32,10			
	Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	5	10.393.647.022	5	1.124.998.160	5	2.242.948.260		265.600.200		11,84			
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		Tersedianya Laporan Fasilitas Pengembangan Kesra Pelayanan Dasar	Dokumen	6	190.236.028.124	6	35.630.549.350	6	39.382.787.918,00		3.860.836.300		9,80			
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	3	186.708.519.065	3	26.046.300.000	3	26.476.844.900,00		3.244.748.500		12,26			
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	2	3.025.514.118	2	306.249.600	2	215.000.000,00		79.922.500		37,17			
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	1	501.994.941	1	9.277.999.750	1	12.690.943.018,00		536.165.300		4,22			
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		Tersedianya Laporan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Dokumen	3	2.058.471.946	3	449.999.500	3	449.999.500,00		131.565.500		29,24			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	1	855.856.277	1	124.999.900	1	124.999.900		48.628.800		38,90			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	1	424.296.999	1	199.999.800	1	199.999.800,00		56.813.300		28,41	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen	1	778.318.670	1	124.999.800	1	124.999.800,00		26.123.400		20,90	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase Bumdes Aktif	%	37	9.389.913.516	37	1.968.000.000	37	2.018.000.000	52,54	581.058.707	142,0	28,79	DPMDes Dukcapil
		Persentase Lembaga Adat Aktif	%	90		90		90		68,35		75,9		
		Persentase Pokja Posyandu aktif	%	100		100		100		85,13		85,1		
		Persentase Posyantek yang aktif	%	64,96		64,96		64,96		65,81		101,3		
Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan yang telah berperan aktif dalam pembangunan di desa	Lembaga	10	9.389.913.516	10	1.968.000.000	10	2.018.000.000	22,98	581.058.707	-	91,42		
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	961.311.217	1	180.000.000	1	180.000.000	30	11.400.000	100,00	99,78		
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga	1	416.990.000	1	440.000.000	1	440.000.000	1	29.648.310	1) 2) 3) 4)	85,08		
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	6.290.659.154	1	131.000.000	1	156.000.000	1	59.022.487	1) 100 2) 100 3) 100	98,92		
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	284.961.117	1	97.000.000	1	122.000.000	1	70.167.910	100,00	99,71		
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	1	244.592.028	1	120.000.000	1	120.000.000	0	10.820.000	100,00	98,79		
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	1	1.191.400.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	0,4	400.000.000	100,00	100,00		
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%	100	6.405.431.759	100	2.000.000.000	100						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase jangkauan pengelolaan kebudayaan	%	100		100	789.925.000	100						
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	150		150	504.195.000	150						
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	6		6	285.730.000	6						
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		Persentase sekolah yang dibina	%	100		100	1.210.075.000	100						
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	25		25	1.210.075.000	25						
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%	100	1.426.928.736	100	159.718.300	100	159.718.300		84.191.000		52,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Persentase sanggar sekolah / sanggar masyarakat yang dibina	%	100		100	159.718.300	100	159.718.300		84.191.000		52,71	
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	1000		1000	159.718.300	1000	159.718.300		84.191.000		52,71	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Cakupan pembinaan sejarah	%	100	719.796.541	100	416.251.100	100	416.251.100		189.213.280		45,46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi		Persentase sekolah yang diinisiasi untuk membentuk Komunitas Sejarah di Satuan Pendidikan	%	40		40	416.251.100	40	416.251.100		189.213.280		45,46	
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	100		100	416.251.100	100	416.251.100		189.213.280		45,46	
												89,38	46,16	
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah		Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%					6		0,00		0,00		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	100,00	11.445.268.038	100,00	5.295.836.600	100,00	5.295.836.600		1.979.739.745		37,38	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00	-	100,00		100,00						
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					407.322.754		1.937.866.900		1.937.866.900		973.623.177		50,24	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kasus	3	245.315.689	3	1.099.000.000	3	1.099.000.000		529.146.903		48,15	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	15	1.008.191.008	15	202.771.400	15	202.771.400		59.715.485		29,45	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2	147.583.899	2	199.999.900	2	199.999.900		107.559.749		53,78	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermanfaat Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	805		805	252.712.100	805	252.712.100		176.928.540		70,01	
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	1		1	80.000.000	1	80.000.000		-		-	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	182	199.508.733	182	100.633.500	182	100.633.500		100.272.500			
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	1		1	2.750.000	1	2.750.000		-			
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur							3.267.249.800		3.267.249.800		927.082.962			
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	4	207.814.021	4	800.000.000	4	800.000.000		268.985.625		33,62	
	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	2	3.577.534.823	2	47.249.800	2	47.249.800		-		-	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	1		1	2.420.000.000	1	2.420.000.000		658.097.337			
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi					2.740.669.153		90.719.900		90.719.900		79.033.606		87,12	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Laporan	2	37.665.904	2	90.719.900	2	90.719.900		79.033.606		87,12	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Desa Bersinar (Bersih Narkoba)	%	86,21	2.436.780.947	86,21	729.844.300	86,21	729.844.300		194.247.320		26,61	Bakesbangpolda gri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen	1	848.629.511,12	1	729.844.300	1	729.844.300		194.247.320		26,61	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	-	1	361.176.400	1	361.176.400		80.270.000		22,22	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	400	253.260.060,03	400	293.787.900	400	293.787.900		70.412.200		23,97	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		241.026.358,63		74.880.000		74.880.000		43.565.120		58,18	
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		Persentase Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	%	100	5.727.596.770	100	720.277.700	100	900.287.800	247,9	663.027.155	247,9	73,65	Biro Hukum
		Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	%	100		100		100						
		Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi	%	100		100		100						
		Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	%	100		100		100						
		Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi	%	100		100		100						
		Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat	%	100		100		100						
Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan		Persentase fasilitas dan evaluasi Produk Hukum Daerah, MoU dan Perjanjian Kerjasama	Persen	100	3.900.653.457,15	100	470.024.900	100	500.034.900	47,9	402.144.055	47,86	80,42	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang terbentuk	Perda	50	937.240.588,17	10	110.000.000	10	100.000.000	0	97.440.000	-	97,44	
			Perkada	150		30		30		14		46,67		
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang terbentuk	Kept. Gub	3500		700	110.000.200	700	100.010.200	229	82.980.000	32,71		
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Terdokumentasi dan tersosialisasi kepada masyarakat	Produk Hukum/Perda/Perkada	200	468.619.122,53	40	90.020.500	40	150.020.500	14	98.772.513	35,00	65,84	
		Jumlah MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	Naskah	125		25		25		20		80,00		
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi dan terevaluasi	Perda	250	1.222.824.591,97	50	160.004.200	50	150.004.200	9	122.951.542	18,00	81,97	
			Perbup/Perwal	500		100		100		49		49,00		
Fasilitasi Bantuan Hukum		Persentase kasus-kasus hukum yang terfasilitasi	Persen	100		100	250.252.800	100	400.252.900	4	260.883.100	4		
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah penanganan masalah hukum (Litigasi)	Perkara	20	1.271.969.154,48	4	200.002.800	4	350.002.900	9	213.363.100	225	60,96	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	Perkara	20		4	50.250.000	4	50.250.000	3	47.520.000	75,00		
		Jumlah Dokumen Pelaporan Rencana Aksi HAM (RANHAM)	Dokumen	15		3		3		0				
												71,76	50,67	
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani		Partisipasi Politik Masyarakat (%)	%											
Sasaran 3: Meningkatnya kesadaran politik masyarakat		Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%				1			0,00		0,00		
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	100	43.528.305.431	100	6.516.334.600	100	7.004.313.100		1.354.508.040		19,3	Bakesbangpolda gri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Politik Dalam Negeri	Dokumen	1	33.671.239.085,96	1	6.516.334.600	1	7.004.313.100		1.354.508.040		19,34	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	200	33.148.535.456,60	200	6.098.219.600	200	6.586.198.100		1.117.504.800		16,97	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	100	279.641.097,96	100	244.885.000	100	244.885.000		103.372.000		42,21	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	1	278.062.531,40	1	173.230.000	1	173.230.000		133.631.240		77,14	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas yang aktif	%	83,01	1.631.097.489	83,01	1.900.285.000	83,01	1.890.285.000		102.681.240		5,43	Bakesbangpolda gri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Laporan Ormas	Dokumen	1	1.600.137.061,11	1	1.900.285.000	1	1.890.285.000		102.681.240		5,43	
	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	100	1.368.000.489,35	100	1.643.300.000	100	1.633.300.000		32.250.000		1,97	
	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	100	172.786.649,34	100	194.390.000	100	194.390.000		24.374.000		12,54	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	0		0	62.595.000	0	62.595.000		46.057.240	-	73,58	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	0		0		0						

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	1		1		1				-		
												-	27,40	
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point											
Sasaran 4: Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%							0,00		0,00		
		Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	%							0,00		0,00		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	65,28	2.440.478.338	65,28	589.785.000	65,28	589.785.000	0	128.775.000	-	21,83	DP3AP2KB
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	45	2.399.214.653	45	89.785.000	45	89.785.000	0	8.775.000	-	9,77	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	2.218.627.294	1	52.785.000	1	52.785.000	0	7.375.000	-	13,97	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	47	180.587.359	47	37.000.000	47	37.000.000	0	1.400.000	-	3,78	
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi		Proporsi kader perempuan di partai politik	persen	39,2	41.263.686	39,2	500.000.000	39,2	500.000.000	0	120.000.000	-	24,00	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	41.263.686	1	500.000.000	1	500.000.000	0	120.000.000	-	24,00	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan	%	3,00	734.965.548	3,00	263.878.800	3,00	263.965.400		83.158.300		31,50	DP3AP2KB
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	kasus	237	111.895.897	237	66.247.500	237	69.252.000		8.123.000	-	11,73	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	111.895.897	1	66.247.500	1	69.252.000		8.123.000	-	11,73	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	layanan	50			85.093.000		85.033.000		9.457.000			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	60			85.093.000		85.033.000		9.457.000			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	orang	30	85033000	30	112.538.300	30	109.680.400		65.578.300	-	59,79	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM penyelenggara lembaga perlindungan perempuan (satgas, gugus tugas, forum layanan) yang mendapatkan pelatihan	orang	30		30	59.966.200	30	57.108.300		38.708.300			
		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	0	85033000	0		0						
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	40	623.069.651	40	52.572.100	40	52.572.100		26.870.000	-	51,11	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Index Ketahanan Keluarga	%	5,5	525.129.408	5,5	73.000.000	5,5	73.000.000		15.480.000		21,21	DP3AP2KB
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		Jumlah Desa Model Ketahanan Keluarga	desa	3	525.129.408	3	73.000.000	3	73.000.000		15.480.000		21,21	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	40	363.018.623	40	25.000.000	40	25.000.000		8.630.000		34,52	
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	162.110.785	1	48.000.000	1	48.000.000		6.850.000	-	14,27	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Dokumen Gender	dokumen	1	90.540.440	1	18.000.000	1	18000000		4.500.000			DP3AP2KB
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		Data Gender dan Anak	dokumen	1	90.540.440	1	18.000.000	1	18000000		4.500.000			
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	1	90.540.440	1	18.000.000	1	18000000		4.500.000			
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase PD yang menerapkan Pengarusutamaan Hak Anak	%	42,00	618.134.168	42,00	360.645.500	42,00	360.645.500	70	169.513.320	166,67	47,00	DP3AP2KB
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	organisasi	50	618.134.168	50	360.645.500	50	360.645.500	75	169.513.320	150,00	47,00	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	50	292.754.857	50	192.845.000	50	192.845.000	75	147.408.320	150,00	76,44	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	10	325.379.312	10	167.800.500	10	167.800.500	0	22.105.000	-	13,17	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		169553200,00	817.988.306	1,00	338.964.200	1,00	339.423.300		56.967.200	-	16,78	DP3AP2KB

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	dokumen	10	-	10	87.620.000	10	94.725.000		-		-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	94.725.000	0	87.620.000	0	94.725.000		-		-	
		Meingkatnya pemahaman masyarakat terhadap perda dan pergub perlindungan anak	%	75	169.471.000	75		75						
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus	dokumen	10			169.411.000		169.471.000		54.967.200			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Layanan	80			169.411.000		169.471.000		54.967.200			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Anak yang mendapat peningkatan kapasitas	orang	36	169.471.000	36	81.933.200	36	75.227.300		2.000.000			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	432.470.345	0	81.933.200	0	75.227.300		2.000.000		2,66	
		Meningkatnya Kemampuan aktivis PATBM dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan sebanyak 36 orang	%	80	122.860.293	80		80						
		Meningkatnya kemampuan kapasitas sumberdaya lembaga dalam upaya perlindungan anak	%	80	641.199.655	80		80						
												29,17	24,24	
												39,35	34,06	